



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦝꦏꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦼꦫꦗꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦏꦿꦠꦤ꧀

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦢꦼꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦏꦼꦢꦼꦫꦃꦲꦶꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦏꦂꦠ

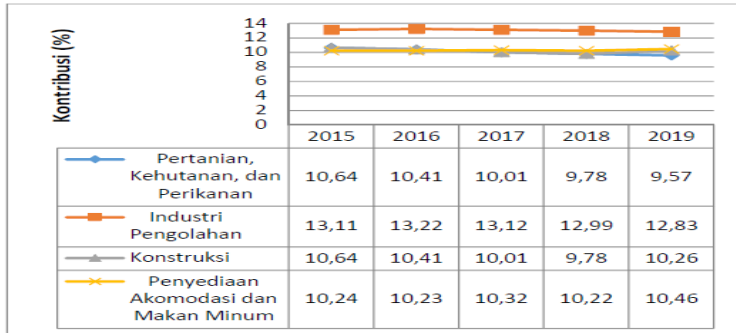
1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial
 - n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - w. Komunikasi dan Informatika
 - x. Perpustakaan
2. Urusan pilihan meliputi:
 - a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
3. Urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2019 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2019 sebanyak 116 akuntansi terdiri dari 33 Pengguna Anggaran dan 83 Kuasa Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

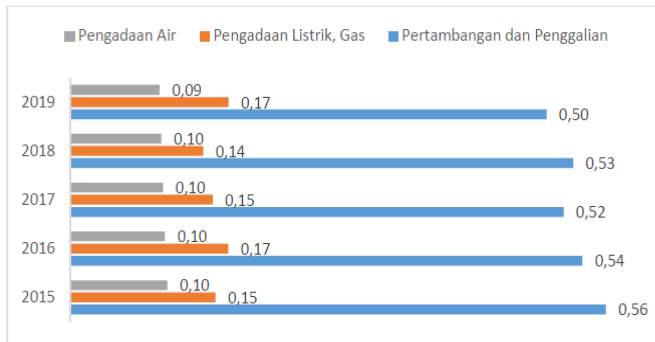
பெரிமாறுவாடகா வாகா வாகா ஸ்திரீயா வாகா வாகா வாகா



Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.2. Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.

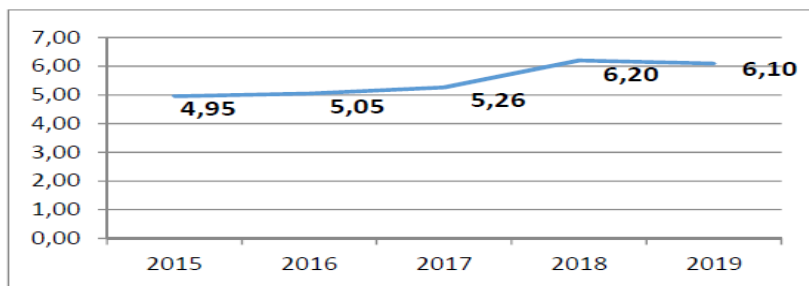


Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.3. Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

B. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan
Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Filosofi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dasar Filosofi

"Renaissance Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaissance Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Konsep "Renaissance Yogyakarta" atau "Jogja Renaissance" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaissance Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaissance Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) Bawana Yogyakarta tidak Hayu lagi baik dalam dimensi Bawana Alit-Bawana Ageng maupun Bawana Lahir-Bawana Batin; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai sangkan paraning dumadi-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتاه دايراه ايسيمهوا يوجياكارتا

Tabel 2.4. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
<p>Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan.</p> <p>Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Pembangunan fasilitas-Fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect and forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.</p> <p>Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.</p> <p>Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi.</p> <p>Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>
Implementasi dalam RPJMD DIY			
	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas tema visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui peningkatan, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமதி மனிதர் மனிதர் மனிதர் மனிதர் மனிதர் மனிதர்

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

1. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah DIY.
2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
3. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
3. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

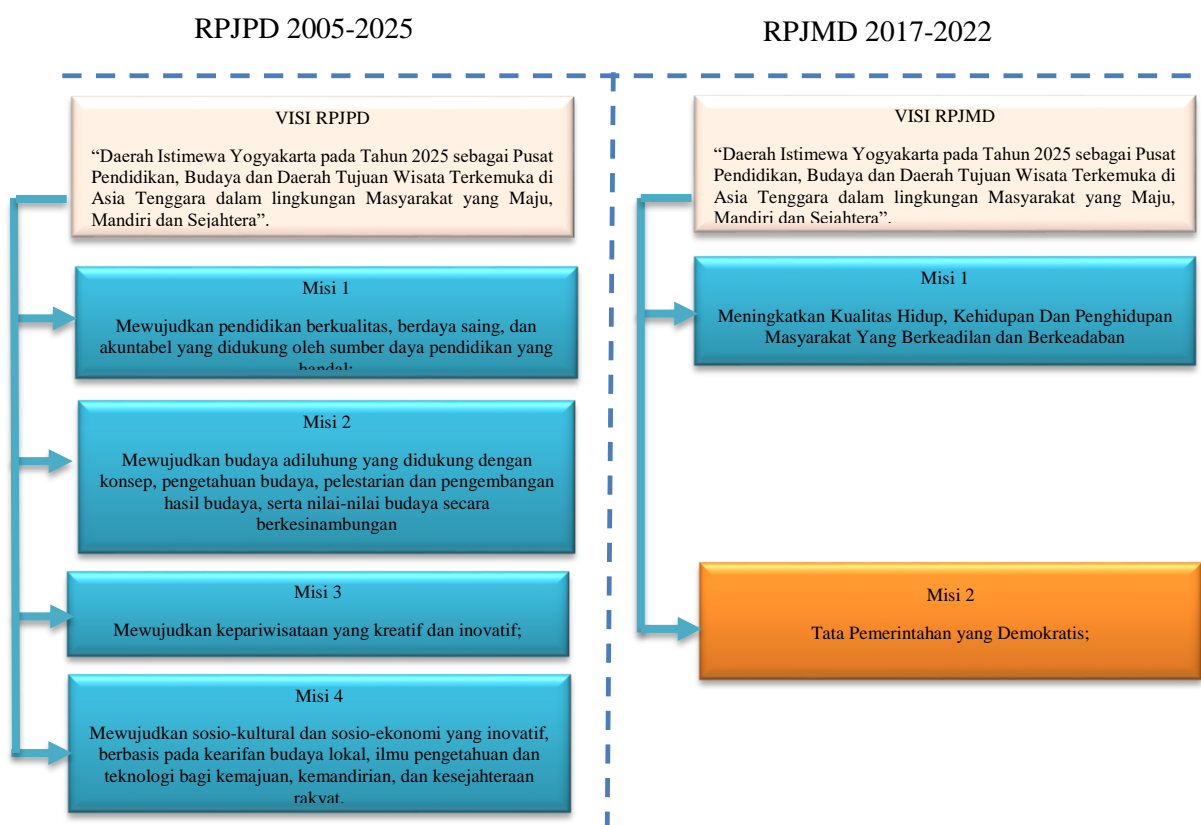


PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாக நவாக நவாகிழைபாதுபாதுபாதுபாது

melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaannya misi kedua menjadi sebuah "initial condition" untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".



Gambar 2.13. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun-1 (2018)	
			Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	
	Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan Wakil Gubernur
	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A	A	
PROGRAM Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan keuangan daerah	Sedang	Sedang	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424.672.744	
	Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	
	Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	
	Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40	
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan
	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdas kelembagaan	N/A	N/A	
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

Berdasarkan kata kunci tema dan penjelasan tersebut dirumuskan prioritas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan yang sinergis dengan prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

3. Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi di DIY yang dicapai 6,20 (2018, BPS) belum merata apabila melihat capaian Indeks Williamson 0,4599 yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,4559 (tercapai 99,12%). Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori low growth - pro poor (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori high growthless pro poor (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori low growth - less pro poor (kuadran I). Apabila didasarkan pada analisis Shift Share yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sektoral dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota dengan pertumbuhan pesat (kuadran III). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV) (Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan:

1. Perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
2. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan;
3. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Sesuai arahan Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendorong terjadinya pertumbuhan berkualitas yakni pertumbuhan yang inklusif dimana hasil pembangunan adalah pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (Bank Dunia). Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY “Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉகழ்வாஉகழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வா

4.	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan mempedomani prioritas nasional sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Rancangan RKP Tahun 2020), beserta indikator dapat disampaikan penyelarasan dengan Tema dan Prioritas RKPD DIY beserta Sasaran-Indikator Sasaran dan Program Pemda DIY sebagai berikut :

Tabel : Tema dan Prioritas pembangunan DIY

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas		Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda		
	Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY				Prioritas DIY	
1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		
						Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	
						1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
					1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
						1.1.2.2. Persentase Angka Kemiskinan	
					1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.1.3.1. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
2. Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan Wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	1.1.5.1. indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan		



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தலம் கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா

3. Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (**Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
				1.1.4.3. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan ruang
				1.1.4.4. Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja				1.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan	Pendukung Prioritas Pembangunan	Pendukung Prioritas Pembangunan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1.1. Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
				2.1.1.2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	2.1.2.1. Persentase Capaian program Urusan keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	2.1.3.1. Bidang Tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

3. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji Bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tidak dijadikan penghitung besaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
4. Penyesuaian Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dengan memperhitungkan kekurangan pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota atas kelebihan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35, naik sebesar Rp915.954.579.764,90 dibandingkan Anggaran Belanja TA 2019 sebesar Rp4.949.650.384.323,45.

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah melakukan penyesuaian anggaran penyertaan modal yang semula ditetapkan sebesar Rp 178.630.000.000,00 menjadi sebesar Rp117.590.000.000,00. Penyesuaian tersebut digunakan untuk menambah alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan Penyertaan Modal untuk Perusda Tirta Tama sebesar Rp12.500.000.000,00.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93, dapat direalisasikan sebesar Rp5.611.510.924.299,71 atau 100,96% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% dari target setelah perubahan, realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp2.371.44.354.021,00 atau 98,99% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.363.759.740.924,00 atau 100,06% dari target setelah perubahan.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dapat direalisasikan sebesar Rp5.433.180.699.355,67 atau 92,63% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.626.221.964.680,02 atau 93,36% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.806.958.734.675,65 atau 91,19% dari target belanja setelah perubahan.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp425.069.919.295,42 dan realisasi sebesar Rp423.712.988.195,42 atau 99,68% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp420.567.958.995,42 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp3.145.029.200,00 atau 69,86%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp101.000.000.000,00, Penyertaan Modal Ke ASKRIDA sebesar Rp90.000.000,00, Penyertaan Modal ke PD Air Bersih sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Fasilitasi Dana Bergulir sebesar Rp4.000.000.000,00 melalui BUKP.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada TA 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp484.453.213.139,46 dan secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுதல் கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	21.929.530.536,00	19.035.548.415,00	(2.893.982.121,00)	87,80	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.777.383.000,00	8.197.444.088,00	(2.579.938.912,00)	76,06	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	2.878.572.400,00	2.806.772.678,00	(71.799.722,00)	97,50	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	14.646.124.100,00 0	11.013.827.944,00	(3.632.296.156,00)	75,19	%
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	953.210.400,00	918.304.380,00	(34.906.020,00)	96,33	%
Program Penyelenggaraan Perumahan	8.559.229.380,00	8.206.345.723,00	(352.883.657,00)	95,87	%
Program Penyelenggaraan Prasana Sarana Utilitas Kawasan	1.440.701.520,00	1.184.519.250,00	(256.182.270,00)	82,21	%
Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan	3.937.255.000,00	2.756.363.350,00 0	(1.180.891.650,00)	70,00	%
Program Pengelolaan Air Tanah	12.994.160.500,00	11.237.138.850,00	(1.757.021.650,00)	86,47	%
Program Pengelolaan Pertambangan	900.015.000,00	823.306.100,00	(76.708.900,00)	91,47	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	183.994.000,00	183.994.000,00	0,00	100,00	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	417.529.745.428,00	412.190.812.905,00	(5.338.932.523,00)	98,72	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	364.980.550,00	364.980.550,00	0,00	100,00	%
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG					
BELANJA DINAS PERTARU	47.515.576.065,0	41.518.983.074,00	(5.996.592.991,00)	87,37	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84	%
Belanja Pegawai	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84	%
BELANJA LANGSUNG	43.707.832.640,00	38.059.832.852,00	(5.647.999.788,00)	87,07	%
Program Administrasi Perkantoran	1.015.610.600,00	764.394.767,00	(251.215.833,00)	75,26	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.939.200,00	420.912.379,00	(100.026.821,00)	80,79	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	93.475.500,00	76.061.750,00	(17.413.750,00)	81,37	%
Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	283.045.000,00	282.100.500,00	(944.500,00)	99,66	%
Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	261.382.000,00	242.564.376,00	(18.817.624,00)	92,80	%
Program Tertib Administrasi Pertanahan	28.766.000,00	28.766.000,00	-	00,00	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	(3.859.991.949,00)	89,36	%
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	2.302.063.000,00	1.967.437.637,00	(334.625.363,00)	85,46	%
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	860.827.800,00	477.436.000,00	(383.391.800,00)	55,46	%
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.090.543.000,00	960.633.280,00	(129.909.720,00)	88,08	%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	504.196.788,00	412.534.360,00	(91.662.428,00)	81,82	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	460.000.000,00	0,00	(460.000.000,00)	-	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தலம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92	%
Belanja Pegawai	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92	%
BELANJA LANGSUNG	19.511.752.000,00	17.867.147.533,64	(1.644.604.466,36)	91,57	%
Program Administrasi Perkantoran	1.937.493.000,00	1.692.183.820,00	(245.309.180,00)	87,33	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.429.000,00	691.725.675,00	(78.703.325,00)	89,78	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	89.802.000,00	87.436.000,00	(2.366.000,00)	97,36	%
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.544.905.000,00	1.522.344.001,00	(22.560.999,00)	98,53	%
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	4.282.062.000,00	5.263.425.363,00	981.363.363,00	122,92	%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.883.086.000,00	8.606.057.674,64	(2.277.028.325,36)	79,18	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
SOSIAL					
DINAS SOSIAL					
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
Hasil Retribusi Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA DINAS SOSIAL	68.446.611.129,11	62.312.687.145,00	(6.133.923.984,11)	91,03	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44	%
Belanja Pegawai	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44	%
BELANJA LANGSUNG	45.457.655.707,11	41.520.180.876,00	(3.937.474.831,11)	91,33	%
Program Administrasi Perkantoran	17.140.435.573,11	15.706.390.712,00	(1.434.044.861,11)	91,63	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.240.555.859,00	4.983.825.471,00	(256.730.388,00)	95,10	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	26.112.000,00	26.112.000,00	0,00	100,00	%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	82.160.000,00	63.480.000,00	(18.680.000,00)	77,26	%
Program Rehabilitasi Sosial	4.610.432.995,00	4.323.336.716,00	(287.096.279,00)	93,77	%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.038.962.600,00	2.868.120.370,00	(170.842.230,00)	94,37	%
Program Penanganan Fakir Miskin	2.071.606.500,00	1.610.950.200,00	(460.656.300,00)	77,76	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1.904.038.925,00	1.849.478.045,00	(54.560.880,00)	97,13	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	1.054.814.000,00	1.034.313.325,00	(20.500.675,00)	98,05	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	2.059.705.745,00	2.014.615.953,00	(45.089.792,00)	97,81	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	1.258.850.000,00	1.138.201.550,00	(120.648.450,00)	90,41	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	1.295.803.500,00	1.159.612.764,00	(136.190.736,00)	89,48	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	991.233.650,00	975.752.000,00	(15.481.650,00)	98,43	%
Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	2.258.844.360,00	1.683.146.500,00	(575.697.860,00)	74,51	%
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	(341.254.730,00)	85,92	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
TENAGA KERJA					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
PENDAPATAN DISNAKERTRANS	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61	%
Pendapatan Asli Daerah	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61	%
Hasil Retribusi Daerah	1.284.756.000,00	1.778.155.000,00	493.399.000,00	138,40	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-	%
BELANJA DISNAKERTRANS	23.835.181.547,00	22.120.340.823,00	(1.714.840.724,00)	92,80	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52	%
Belanja Pegawai	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52	%
BELANJA LANGSUNG	10.621.771.970,00	9.498.489.700,00	(1.123.282.270,00)	89,42	%
Program Administrasi Perkantoran	3.847.805.620,00	3.313.058.657,00	(534.746.963,00)	86,10	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.819.517.350,00	2.524.334.676,00	(295.182.674,00)	89,53	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	282.185.000,00	279.715.000,00	(2.470.000,00)	99,12	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	284.085.000,00	256.017.500,00	(28.067.500,00)	90,12	%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	114.268.000,00	93.821.200,00	(20.446.800,00)	82,10	%
Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi dan Pemagangan	208.880.500,00	208.426.500,00	(454.000,00)	99,78	%
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	321.611.000,00	320.834.630,00	(776.370,00)	99,75	%
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	335.833.000,00	317.017.000,00	(18.816.000,00)	94,39	%
Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	656.778.500,00	575.845.537,00	(80.932.963,00)	87,67	%
Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	1.750.808.000,0	1.609.419.000,00	(141.389.000,00)	91,92	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
BELANJA DINAS P3AP2	7.717.460.323,00	7.199.857.614,00	(517.602.709,00)	93,29	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74	%
Belanja Pegawai	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74	%
BELANJA LANGSUNG	4.854.608.640,00	4.487.337.923,00	(367.270.717,00)	92,43	%
Program Administrasi Perkantoran	1.454.479.420,00	1.314.135.585,00	(140.343.835,00)	90,35	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	722.077.720,00	712.783.939,00	(9.293.781,00)	98,71	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வா உழவா உழைப்பினை உயர்த்துக

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	123.414.000,00	114.889.000,00	(8.525.000,00)	93,09	%
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	640.821.000,00	628.684.000,00	(12.137.000,00)	98,10	%
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	513.882.000,00	488.692.125,00	(25.189.875,00)	95,09	%
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	230.538.500,00	221.895.274,00	(8.643.226,00)	96,25	%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	371.520.500,00	291.560.500,00	(79.960.000,00)	78,47	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	797.875.500,00	714.697.500,00	(83.178.000,00)	89,57	%
URUSAN KONKUREN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
PENDAPATAN DLHK	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31	%
Pendapatan Asli Daerah	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31	%
Hasil Retribusi Daerah	16.323.353.000,00	16.208.007.263,71	(115.345.736,29)	99,29	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	409.761.125,00	409.761.125,00	0,00	-	%
BELANJA DLHK	48.030.733.178,00	44.389.681.878,00	(3.641.051.300,00)	92,41	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41	%
Belanja Pegawai	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41	%
BELANJA LANGSUNG	24.769.087.409,00	22.427.104.515,00	(2.341.982.894,00)	90,54	%
Program Administrasi Perkantoran	2.848.775.250,00	2.502.797.803,00	(345.977.447,00)	87,85	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.964.425.242,00	1.775.591.083,00	(188.834.159,00)	90,38	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	192.907.000,00	187.425.200,00	(5.481.800,00)	97,15	%
Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	322.201.500,00	307.816.500,00	(14.385.000,00)	95,53	%
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	288.536.900,00	235.841.900,00	(52.695.000,00)	81,73	%
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1.219.946.520,00	1.132.912.100,00	(87.034.420,00)	92,86	%
Program Pegelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	973.039.900,00	816.515.800,00	(156.524.100,00)	83,91	%
Program Pengelolaan Persampahan Regional	8.824.492.517,00	8.171.625.905,00	(652.866.612,00)	92,60	%
Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	279.156.000,00	273.779.200,00	(5.376.800,00)	98,07	%
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.973.650.580,00	6.159.702.574,00	(813.948.006,00)	88,32	%
Program Pengelolaan Hutan Konservasi	263.364.500,00	260.546.500,00	(2.818.000,00)	98,93	%
Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	401.931.500,00	393.089.550,00	(8.841.950,00)	97,80	%
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	182.000.000,00	175.140.400,00	(6.859.600,00)	96,23	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	34.660.000,00	34.320.000,00	(340.000,00)	99,01	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERHUBUNGAN					
DINAS PERHUBUNGAN					
PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	%
Pendapatan Asli Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	%
Hasil Retribusi Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	%
BELANJA DINAS PERHUBUNGAN	26.967.535.763,00	24.304.688.951,00	(2.662.846.812,00)	90,12	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47	%
Belanja Pegawai	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47	%
BELANJA LANGSUNG	19.164.834.614,00	17.089.336.755,00	(2.075.497.859,00)	89,17	%
Program Admnistrasi Perkantoran	4.751.376.000,00	4.185.885.129,00	(565.490.871,00)	88,09	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.414.931.916,00	1.370.469.416,00	(44.462.500,00)	96,85	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	460.401.000,00	443.867.500,00	(16.533.500,00)	96,40	%
Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	5.735.572.000,00	4.666.141.909,00	(1.069.430.091,00)	81,35	%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.292.134.600,00	1.252.387.560,00	(39.747.040,00)	96,92	%
Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.089.511.888,00	1.022.777.450,00	(66.734.438,00)	93,87	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	1.099.548.000,00	902.529.189,00	(197.018.811,00)	82,08	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	(76.080.608,00)	97,70	%
URUSAN KONKUREN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
PENDAPATAN DINAS KOMINFO	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	%
Pendapatan Asli Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	%
Hasil Retribusi Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	%
BELANJA DINAS KOMINFO	48.050.515.863,00	46.230.575.777,00	(1.819.940.086,00)	96,21	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76	%
Belanja Pegawai	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76	%
BELANJA LANGSUNG	43.571.479.950,00	42.209.764.691,00	(1.361.715.259,00)	96,87	%
Program Administrasi Perkantoran	1.158.919.000,00	996.291.108,00	(162.627.892,00)	85,96	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.677.000,00	303.982.693,00	(54.694.307,00)	84,75	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	73.211.000,00	66.797.000,00	(6.414.000,00)	91,23	%
Program Informasi dan Komunikasi Publik	810.756.000,00	783.926.000,00	(26.830.000,00)	96,69	%
Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian	1.345.205.000,00	1.162.776.467,00	(182.428.533,00)	86,43	%
Program Layanan Teknologi Informasi	917.997.000,00	895.180.300,00	(22.816.700,00)	97,51	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	(905.903.827,00)	97,67	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
PENDAPATAN DINAS KOPERASI DAN UKM	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98	%
Pendapatan Asli Daerah	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98	%
Hasil Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.700.000,00	200.000,00	104,44	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	593.349.473,00	593.349.473,00	-	%
BELANJA DINAS KOPERASI DAN UKM	23.212.159.028,00	21.036.500.408,00	(2.175.658.620,00)	90,63	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05	%
Belanja Pegawai	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05	%
BELANJA LANGSUNG	19.797.065.578,00	17.756.019.111,00	(2.041.046.467,00)	89,69	%
Program Administrasi Perkantoran	1.031.519.500,00	838.315.099,00	(193.204.401,00)	81,26	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.207.482.800,00	668.401.550,00	(539.081.250,00)	55,35	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	87.036.500,00	78.036.500,00	(9.000.000,00)	89,65	%
Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	1.212.823.500,00	1.175.907.500,00	(36.916.000,00)	96,95	%
Program Pengembangan Perkoperasian	1.752.761.000,00	1.693.913.059,00	(58.847.941,00)	96,64	%
Program Pengembangan UKM	10.372.657.028,00	9.410.739.403,00	(961.917.625,00)	90,73	%
Program Peningkatan Akses Pembiayaan	50.820.000,00	48.480.000,00	(2.340.000,00)	95,39	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	275.000.000,00	272.120.000,00	(2.880.000,00)	98,95	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.806.965.250,00	3.570.106.000,00	(236.859.250,00)	93,77	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PENANAMAN MODAL					
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL					
PENDAPATAN DPPM	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81	%
Pendapatan Asli Daerah	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81	%
Hasil Retribusi Daerah	392.320.000,00	510.015.000,00	117.695.000,00	129,99	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA DPPM	5.992.188.224,00	5.601.799.349,00	(390.388.875,00)	93,48	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86	%
Belanja Pegawai	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86	%
BELANJA LANGSUNG	2.412.234.549,00	2.134.138.001,00	(278.096.548,00)	88,47	%
Program Administrasi Perkantoran	1.395.053.880,00	1.051.492.719,00	(266.841.780,00)	79,75	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.283.300,00	473.013.532,00	(7.269.768,00)	98,48	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	68.951.500,00	68.951.500,00	0,00	100,00	%
Program Promosi Investasi	112.114.750,00	110.799.750,00	(1.315.000,00)	98,82	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கல்வா உகவா உகவா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா கல்வா

Program Peningkatan Iklim Investasi	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	100,00	%
Program Pelayanan Perijinan	279.878.000,00	279.068.000,00	(810.000,00)	99,71	%
Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan	130.152.500,00	128.292.500,00	(1.860.000,00)	98,57	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KEBUDAYAAN					
DINAS KEBUDAYAAN					
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	%
Pendapatan Asli Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	%
Hasil Retribusi Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	%
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	314.966.111.077,00	296.976.785.408,00	(17.989.325.669,00)	94,28	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93	%
Belanja Pegawai	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93	%
BELANJA LANGSUNG	302.684.347.308,00	285.070.906.852,00	(17.613.440.456,00)	94,18	%
Program Administrasi Perkantoran	6.695.551.100,00	5.445.628.648,00	(1.249.922.452,00)	81,33	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.733.100,00	520.510.096,00	(79.223.004,00)	88,08	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	52.795.500,00	48.430.000,00	(4.365.500,00)	91,73	%
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	41.087.112.920,00	36.193.421.112,00	(4.893.691.808,00)	90,66	%
Program Penguatan Museum Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	(900.354.612,00)	92,77	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	184.024.201.850,00	183.161.315.760,00	(862.886.090,00)	99,53	%
Program Pengelolaan Taman Budaya	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	(231.692.660,00)	96,17	%
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	5.653.688.000,00	5.047.919.345,00	(605.768.655,00)	89,28	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	2.772.669.522,00	1.992.745.467,00	(779.924.055,00)	71,87	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	43.276.832.650,00	35.271.221.030,00	(8.005.611.620,00)	81,50	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERPUSTAKAAN					
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					
PENDAPATAN DPAD	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32	%
Pendapatan Asli Daerah	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32	%
Hasil Retribusi Daerah	123.000.000,00	152.794.300,00	29.794.300,00	124,22	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	120.000,00	120.000,00	-	%
BELANJA DPAD	22.202.840.172,00	21.156.889.048,00	(1.045.951.124,00)	95,29	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11	%
Belanja pegawai	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11	%
BELANJA LANGSUNG	14.546.517.089,00	13.951.348.087,00	(595.169.002,00)	95,91	%
Program Administrasi Perkantoran	5.419.484.103,00	5.117.796.641,00	(301.687.462,00)	94,43	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாநகரம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம்

DINAS PARIWISATA					
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23	%
Pendapatan Asli Daerah	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23	%
Hasil Retribusi Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.250.000,00	31.720.994,00	(3.529.006,00)	89,98	%
BELANJA DINAS PARIWISATA	22.270.777.488,00	16.562.042.923,00	(5.708.734.565,00)	74,36	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95	%
Belanja Pegawai	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95	%
BELANJA LANGSUNG	17.721.268.250,00	12.242.248.830,00	(5.479.019.420,00)	69,08	%
Program Administrasi Perkantoran	1.312.379.000,00	819.507.170,00	(492.871.830,00)	62,44	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	507.714.000,00	462.190.420,00	(45.523.580,00)	91,03	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	278.905.500,00	258.715.000,00	(20.190.500,00)	92,76	%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.989.000.000,00	1.008.594.500,00	(980.405.500,00)	50,70	%
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	362.387.250,00	212.562.000,00	(149.825.250,00)	58,65	%
Program Pengembangan Industri Pariwisata	281.545.000,00	240.463.000,00	(41.082.000,00)	85,40	%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.061.512.000,00	4.199.137.550,00	(1.862.374.450,00)	69,27	%
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.146.873.000,00	3.398.551.690,00	(1.748.321.310,00)	66,03	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.780.952.500,00	1.642.527.500,00	(138.425.000,00)	92,22	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
PERTANIAN					
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
PENDAPATAN DPKP	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69	%
Pendapatan Asli Daerah	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69	%
Hasil Retribusi Daerah	1.483.463.180,00	2.093.646.820,00	610.183.640,00	141,13	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.751.000,00	124.998.600,00	20.247.600,00	119,32	%
BELANJA	44.304.152.668,23	42.084.829.468,00	(2.219.323.200,23)	94,99	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02	%
Belanja Pegawai	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02	%
BELANJA LANGSUNG	19.082.402.673,23	17.865.633.130,00	(1.216.769.543,23)	93,62	%
Program Administrasi Perkantoran	4.202.082.803,22	3.413.910.209,00	(788.172.594,22)	81,24	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.863.727.259,77	2.779.836.200,00	(83.891.059,77)	97,07	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15.200.000,00	15.133.000,00	(67.000,00)	99,55	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	64.704.000,00	64.570.250,00	(133.750,00)	99,79	%
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	129.266.480,00	125.996.480,00	(3.270.000,00)	97,47	%
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.052.579.775,24	2.859.627.293,00	(192.952.482,24)	93,67	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வா உருவா உருவாழ்வு எயலாதுலாதுறாது

BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
Belanja Pegawai	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
SEKRETARIAT DAERAH					
PENDAPATAN	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
Hasil Retribusi Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA SETDA	62.454.018.536,00	53.821.946.480,00	(8.632.072.056,00)	86,17	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38	%
Belanja Pegawai	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38	%
BELANJA LANGSUNG	35.912.023.893,00	28.769.092.751,00	(7.142.931.142,00)	80,10	%
Program Administrasi Perkantoran	10.517.848.700,00	7.490.711.624,00	(3.027.137.076,00)	71,21	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.776.383.500,00	7.544.653.666,00	(231.729.834,00)	97,02	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	468.833.500,00	434.198.725,00	(34.634.775,00)	92,61	%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	116.808.000,00	99.058.000,00	(17.750.000,00)	84,80	%
Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	95.987.000,00	88.598.500,00	(7.388.500,00)	92,30	%
Program Dokumentasi Hukum	355.329.000,00	316.687.500,00	(38.641.500,00)	89,12	%
Program Bantuan dan Layanan Hukum	2.266.893.000,00	2.187.398.178,00	(79.494.822,00)	96,49	%
Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	100.448.500,00	80.503.000,00	(19.945.500,00)	80,14	%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	589.241.500,00	524.524.750,00	(64.716.750,00)	89,01	%
Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	451.561.000,00	373.503.950,00	(78.057.050,00)	82,71	%
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	406.859.000,00	321.376.000,00	(85.483.000,00)	78,98	%
Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	119.326.000,00	95.088.000,00	(24.238.000,00)	79,68	%
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	1.160.498.000,00	1.083.934.000,00	(76.564.000,00)	93,40	%
Program Pelayanan Keprotokolan	1.209.984.500,00	774.219.500,00	(435.765.000,00)	63,98	%
Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	961.925.000,00	940.540.300,00	(21.384.700,00)	97,77	%
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	360.184.000,00	303.574.700,00	(56.609.300,00)	84,28	%
Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah	132.058.250,00	110.858.250,00	(21.200.000,00)	83,94	%
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	49.830.000,00	48.030.000,00	(1.800.000,00)	96,38	%
Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	73.164.000,00	66.814.000,00	(6.350.000,00)	91,32	%
Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	341.754.340,00	307.196.000,00	(34.558.340,00)	89,88	%
Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	90.347.000,00	67.569.000,00	(22.778.000,00)	74,78	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாடு கல்வாடு கல்வாடு கல்வாடு கல்வாடு கல்வாடு கல்வாடு

Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	857.695.000,00	833.072.888,00	(24.622.112,00)	97,12	%
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
BELANJA DPRD	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	%
Belanja Pegawai	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	%
SEKRETARIAT DPRD					
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	73.062.817.844,00	55.650.672.651,00	(17.412.145.193,00)	76,16	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88	%
Belanja Pegawai	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88	%
BELANJA LANGSUNG	67.441.096.111,00	50.429.012.838,00	(17.012.083.273,00)	74,77	%
Program Administrasi Perkantoran	8.213.865.000,00	5.838.128.686,00	(2.375.736.314,00)	71,07	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.796.388.000,00	3.456.270.873,00	(340.117.127,00)	91,04	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75.770.000,00	75.377.500,00	(392.500,00)	99,48	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	157.383.000,00	156.514.000,00	(869.000,00)	99,44	%
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30.053.668.111,00	20.661.163.726,00	(9.392.504.385,00)	68,74	%
Program Pengembangan Regulasi Daerah	9.254.377.000,00	7.600.302.290,00	(1.654.074.710,00)	82,12	%
Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	15.889.645.000,00	12.641.255.763,00	(3.248.389.237,00)	79,55	%
INSPEKTORAT					
BELANJA INSPEKTORAT	14.522.464.795,00	13.899.300.234,00	(623.164.561,00)	95,70	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07	%
Belanja Pegawai	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07	%
BELANJA LANGSUNG	8.370.160.000,00	7.865.534.808,00	(504.625.192,00)	93,97	%
Program Administrasi Perkantoran	968.962.000,00	842.753.611,00	(126.208.389,00)	86,97	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.539.594.000,00	1.448.341.822,00	(91.252.178,00)	94,07	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.072.000,00	42.364.000,00	(97.708.000,00)	30,24	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.484.000,00	83.938.000,00	(1.546.000,00)	98,19	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	5.636.048.000,00	5.448.137.375,00	(187.910.625,00)	96,66	%
PANIRADYA KAISTIMEWAN					
BELANJA PANIRADYA KAISTIMEWAN	11.301.857.737,0	10.488.626.016,00	(813.231.721,00)	92,80	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69	%
Belanja Pegawai	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69	%
BELANJA LANGSUNG	8.330.823.850,00	7.556.430.325,00	(774.393.525,00)	90,70	%
Program Administrasi Perkantoran	297.468.000,00	239.235.150,00	(58.232.850,00)	80,42	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வா உருவா உருவாழ்வு எயலாதுலாதுறாது

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	254.584.000,00	237.328.500,00	(17.255.500,00)	93,22	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	23.540.000,00	22.231.000,00	(1.309.000,00)	94,43	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2.734.486.500,00	2.330.913.675,00	(403.572.825,00)	85,24	%
Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	920.469.000,00	903.718.200,00	(16.750.800,00)	98,18	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan	1.336.649.200,00	1.208.757.000,00	(127.892.200,00)	90,43	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	157.223.000,00	139.202.300,00	(18.020.700,00)	88,53	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	251.732.000,00	223.805.900,00	(27.926.100,00)	88,90	%
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	335.751.250,00	297.280.600,00	(38.470.650,00)	88,54	%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	2.018.920.900,00	1.953.958.000,00	(64.962.900,00)	96,78	%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
BELANJA	15.865.276.197,00	14.217.000.389,00	(1.648.275.808,00)	89,61	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82	%
Belanja Pegawai	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82	%
BELANJA LANGSUNG	8.244.498.170,00	6.838.414.056,00	(1.406.084.114,00)	82,94	%
Program Administrasi Perkantoran	1.859.778.370,00	1.020.992.067,00	(838.786.303,00)	54,89	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	904.752.000,00	811.702.139,00	(93.049.861,00)	89,71	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	285.361.000,00	265.178.000,00	(20.183.000,00)	92,92	%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.778.058.000,00	1.578.759.750,00	(199.298.250,00)	88,79	%
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	151.087.000,00	144.957.000,00	(6.130.000,00)	95,94	%
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	452.003.000,00	416.873.000,00	(35.130.000,00)	92,22	%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	78.133.000,00	77.995.950,00	(137.050,00)	99,82	%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	207.458.000,00	202.961.500,00	(4.496.500,00)	97,83	%
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1.539.534.500,00	1.355.435.500,00	(184.099.000,00)	88,04	%
Program Pengembangan Statistik Daerah	881.292.500,00	872.497.800,00	(8.794.700,00)	99,00	%
Program Penelitian dan Pengembangan	107.040.800,00	91.061.350,00	(15.979.450,00)	85,07	%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH					
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET					
PENDAPATAN BPKA	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00	%
Pendapatan Asli Daerah	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00	%
Pajak Daerah	1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	49.679.331.870,00	103,11	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வா உழவா உழைப்பினை உயர்த்துக

Hasil Retribusi Daerah	698.044.875,00	736.782.032,00	38.737.157,00	105,54	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	8,97	100,00	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.279.769.970,05	51.982.661.290,54	19.702.891.320,49	161,03	%
BELANJA BPKA	221.476.886.478,00	210.870.555.950,39	(10.606.330.527,61)	95,21	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80	%
Belanja Pegawai	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80	%
BELANJA LANGSUNG	106.783.652.150,00	104.433.926.321,00	(2.349.725.829,00)	97,79	%
Pogram Administrasi Perkantoran	10.321.487.840,00	9.578.649.105,00	(742.838.735,00)	92,80	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.224.268.100,00	10.768.874.565,00	(455.393.535,00)	95,94	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.187.400,00	84.767.400,00	(420.000,00)	99,50	%
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	910.057.500,00	793.908.500,00	(116.149.000,00)	87,23	%
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	449.997.500,00	364.268.500,00	(85.729.000,00)	80,94	%
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	798.106.000,00	764.844.000,00	(33.262.000,00)	95,83	%
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.160.523.000,00	2.040.040.900,00	(120.482.100,00)	94,42	%
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	6.938.366.310,00	6.582.854.659,00	(355.511.651,00)	94,87	%
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	3.459.527.000,00	3.215.718.000,00	(243.809.000,00)	92,95	%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.734.387.500,00	2.541.673.892,00	(192.713.608,00)	92,95	%
Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	122.944.000,00	122.944.000,00	0,00	100,00	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	(3.417.200,00)	99,99	%
PPKD/BUD					
PENDAPATAN	3.758.192.073.728,39	3.733.661.811.232,00	(24.530.262.496,39)	99,34	%
Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	(23.955.405.496,00)	98,99	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.362.368.884.411,00	(574.857.000,39)	99,95	%
BELANJA	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29	%
Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	(20.511,00)	99,99	%
Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.721.135.000,00	(74.422.969.600,00)	90,09	%
Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	(1.000.000.000,00)	59,87	%
Belanja Bagi Hasil kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	0,00	100,00	%
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pemdes	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	(12.486.111.493,37)	96,91	%
Belanja Tak Terduga	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	(116.847.297.492,72)	72,34	%
Pembiayaan Netto	307.479.919.295,42	0,00	307.479.919.295,42	-	%
Penerimaan Pembiayaan	425.069.919.295,42	0,00	425.069.919.295,42	-	%
Pengeluaran Pembiayaan	117.590.000.000,00	0,00	117.590.000.000,00	-	%
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
PENDAPATAN	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	%
Pendapatan Asli Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	%
Hasil Retribusi Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	%
BELANJA	287.791.363.357,00	285.883.725.042,00	(1.907.638.315,00)	99,34	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91	%
Belanja Pegawai	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91	%
BELANJA LANGSUNG	10.709.896.466,00	9.028.416.934,00	(1.681.479.532,00)	84,30	%
Program Administrasi Perkantoran	2.198.899.966,00	1.662.370.108,00	(536.529.858,00)	75,60	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.168.834.000,00	1.166.516.200,00	(2.317.800,00)	99,80	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Keuangan	56.750.000,00	56.693.000,00	(57.000,00)	99,89	%
Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1.411.584.500,00	841.733.700,00	(569.850.800,00)	59,63	%
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai	4.242.222.000,00	3.863.605.486,00	(378.616.514,00)	91,08	%
Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	143.433.000,00	119.260.100,00	(24.172.900,00)	83,14	%
Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah	419.336.000,00	388.970.000,00	(30.366.000,00)	92,75	%
Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai	873.289.000,00	735.582.840,00	(137.706.160,00)	84,23	%
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	195.548.000,00	193.685.500,00	(1.862.500,00)	99,04	%
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
PENDAPATAN BANDIKLAT	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30	%
Pendapatan Asli Daerah	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30	%
Hasil Retribusi Daerah	1.985.280.000,00	1.986.759.000,00	1.479.000,00	100,07	%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	%
BELANJA	11.349.194.417,00	9.467.309.873,00	(1.881.884.544,00)	83,41	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82	%
Belanja Pegawai	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82	%
BELANJA LANGSUNG	6.504.207.354,00	4.872.959.675,00	(1.631.247.679,00)	74,92	%
Program Administrasi Perkantoran	2.237.582.654,00	1.668.959.250,00	(568.623.404,00)	74,58	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.517.592.000,00	1.376.813.625,00	(140.778.375,00)	90,72	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	98.014.000,00	96.614.000,00	(1.400.000,00)	98,57	%
Program Pendidikan Penjurangan	1.699.759.300,00	1.022.133.500,00	(677.625.800,00)	60,13	%
Program Pendidikan Teknis Fungsional	474.663.900,00	247.083.100,00	(227.580.800,00)	52,05	%
Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	48.521.500,00	44.184.500,00	(4.337.000,00)	91,06	%
Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu	228.074.000,00	222.591.700,00	(5.482.300,00)	97,59	%
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.000.000,00	194.580.000,00	(5.420.000,00)	97,29	%



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉ நழவஉ நழவாழிதலவதலவாநததததத

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas.

h. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகழவனகழவனகழவனகழவனகழவனகழவன

- 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

- b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتاه دايره ايسيمواه يوجاكارتا

Kualitas Piutang	Keterangan
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.

18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.

19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:

- a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
- c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குழுவல் குழுவல் குழுவல் குழுவல் குழுவல் குழுவல்

- potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
- b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتھ داھراھ ايسټيموا يوغياکارتا

- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉ நயவாஉ நயநாடிதலவாதுவாதுயுகாது

- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
 - Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
 - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

s. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉ நழவஉ நழவாழிதலவதலவதழிதலவ

t. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

u. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

v. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريته دايريه ايسيمويه يوجيكرتا

demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிநாட்டாட்சி மன்றம்

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU.
- 2) Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- 3) Pengungkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat
- 4) Bencana Covid-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penganggaran, penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa atas Realisasi Belanja Tidak Terduga

- 1) Pengakuan Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang di dalamnya terdapat kejadian luar biasa.
- 2) Pengukuran Beban Luar biasa sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir output Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan asset tetap/asset lainnya.
- 3) Persediaan dan asset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas COVID-19

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Luar Biasa-LO
- 2) Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD.
- 3) Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD
- 4) Pendapatan dan Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional BPBD
- 5) Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD.

d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD.
- 2) Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan asset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh.
- 3) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD.
- 4) Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

B. Retribusi Daerah Rp36.546.077.142,71 Rp42.420.048.683,08

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp32.999.671.755,00 dan realisasi sebesar Rp36.546.077.142,71 atau 110,75%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.873.971.540,37 atau 13,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp42.420.048.683,08. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	Retribusi Daerah				
a	Retribusi Jasa Umum	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08
b	Retribusi Jasa Usaha	24.643.670.755,00	27.371.265.258,00	111,07	30.816.533.938,00
c	Retribusi Perijinan Tertentu	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00
	Jumlah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	110,75	42.420.048.683,08

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp7.963.681.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.664.796.884,71 atau 108,80% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
a	Retribusi Jasa Umum				
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	64.766.000,00	72.875.000,00	112,52	-
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	4.997.280.884,71	113,86	4.726.190.745,08
3)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	839.782.000,00	100,55	-
4)	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.674.775.000,00	2.754.859.000,00	102,99	6.652.434.000,00
	Jumlah	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp64.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.875.000,00 atau 112,52% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.388.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.997.280.884,71 atau 113,86% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp271.090.139,63 atau 5,42% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.726.190.745,08.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp2.674.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.754.859.000,00 atau 102,99%. Retribusi Pelayanan Pendidikan mencapai target, namun realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.897.575.000,00 atau 58,59% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp6.652.434.000,00 yang disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan sebesar Rp1.776.305.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp120.700.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp120.700.000,00;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாங்கு வாக நுவல நுலுக்கு எலவதலலாறுதலு

2020 mengalami kenaikan sebesar Rp33.539.000,00 atau 70,38% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp47.652.500,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp75.517.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.645.500,00 atau 133,28%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp219.490.000,00 atau 68,35% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp320.135.500,00. Rincian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.541.000,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp15.107.000,00;
- 2) Dinas Kebudayaan (Museum Negeri Sonobudoyo) sebesar Rp87.104.500,00 atau 144,19% dari anggaran sebesar Rp60.410.000,00.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp19.058.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.732.348.410,00 atau 108,78% terdiri dari:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp6.964.331.962,00 atau 134,58% dari anggaran sebesar Rp5.175.000.000,00;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.074.236.879,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp11.790.715.000,00;
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp724.041.900,00 atau 101,64% dari anggaran sebesar Rp712.370.000,00;
- 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.918.392.000,00 atau 143,15% dari anggaran sebesar Rp1.340.142.000,00;
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp51.345.669,00 atau 128,36% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp392.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp510.015.000,00 atau 130,00% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
c	Retribusi Perijinan Tertentu				
1)	Retribusi Izin Trayek	72.220.000,00	77.580.000,00	107,42	55.530.000,00
2)	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00	825.000,00	91,67	1.250.000,00
3)	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	319.200.000,00	431.610.000,00	135,22	168.110.000,00
	Jumlah	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp72.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.580.000,00 atau 107,42%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.050.000,00 atau sebesar 39,71% dibanding tahun 2019 sebesar Rp55.530.000,00.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp900.000,00 dan realisasi sebesar Rp825.000,00 atau sebesar 91,67%. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp825.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp425.000,00 atau 34% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak mencapai target karena Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY nomor 13 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 untuk Kapal dengan berat 11 - 30 GT untuk SIUP, SIPI, SIKPI berlaku 1 Tahun dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پڤمڤرنتھ داءڤرھ داءڤرھ ائسٽمءوا يوءڤاكارٽا

karena Izin Usaha Budidaya ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah yang Lintas Kabupaten Kota sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada yang mengajukan Izin.

- 3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp319.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp431.610.000,00 atau 135,22%. Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA Tahun 2020 sebesar Rp431.610.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp263.500.000,00 atau 156,74% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp168.110.000,00. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan Tenaga Kerja Asing tidak bisa keluar dari Indonesia.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp101.460.382.151,46 Rp85.960.824.196,14

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.460.382.142,49 dan realisasi sebesar Rp101.460.382.151,46 atau 100,00% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.499.557.955,32 atau 18,03% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp85.097.737.606,37. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
a	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	101.361.064.131,49	101.361.064.140,46	100,00	85.712.083.865,14
-	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59
-	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	6.025.001.568,23	6.025.001.568,20	100,00	5.303.393.448,55
b	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	99.318.011,00	99.318.011,00	100,00	248.740.331,00
	Jumlah	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	100,00	85.960.824.196,14

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.361.064.131,49 dan realisasi sebesar Rp101.361.064.131,49 atau 100,00%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dianggarkan sebesar Rp95.336.062.563,26 dan terealisasi sebesar Rp95.336.062.572,26 atau 100,00% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	148.697.623,00	148.697.632,00	100,00	925.083.150,00
b	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	94.001.713.614,26	94.001.713.614,26	100,00	78.265.128.516,59
c	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT AMI)	1.185.651.326,00	1.185.651.326,00	100,00	1.218.478.750,00
	Jumlah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
a	Bagi Hasil Pajak	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00
c	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.234.516.326.000,00	1.227.647.676.000,00	99,44	1.351.102.020.000,00
d	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	98,87	978.540.310.453,00
	Jumlah	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	98,99	2.385.702.912.253,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
a	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
b	Dana Keistimewaan	1.286.576.228.221,39	1.286.576.228.221,00	100,00	1.162.772.688.443,00
c	Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	68.053.994.000,00	100,00	58.831.799.000,00
	Jumlah	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00	100,00	1.221.604.487.443,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Atau Daerah - Lainnya				
a	Bantuan Keuangan	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	3.750.658.573.728,39	3.726.454.595.432,00	99,35	3.608.013.435.006,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp119.819.807.501,00 dan realisasi sebesar Rp114.252.471.928,00 atau 95,35%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp58.216.797.728,00 atau 103,89% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 yaitu sebesar Rp56.035.674.200,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	113.213.216.271,00	108.979.914.503,00	96,26	49.099.528.200,00
b	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.895.404.028,00	3.591.562.731,00	92,20	5.210.616.000,00
c	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.711.187.202,00	1.680.994.694,00	62,00	1.725.530.000,00
	Jumlah	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp31.627.168,00 dan realisasi sebesar Rp24.870.747,00 atau 78,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
a	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	28.446.925,00	14.301.407,00	50,27	3.564.600,00
b	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Lant Rent)	3.180.243,00	8.991.100,00	282,72	21.343.000,00
c	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	1.576.150,00	-	-
d	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	2.090,00	-	-
	Jumlah	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan dianggarkan sebesar Rp28.446.925,00 dan realisasi sebesar Rp14.301.407,00,00 atau 50,27%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريتا دايراه ايسيموا يوجياكارتا

Dana Keistimewaan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61 sehingga menjadi sebesar Rp1.286.576.228.221,39. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.286.576.228.221,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp68.053.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.053.994.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.222.195.000,00 atau 15,68% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2019 yaitu sebesar Rp58.831.799.000,00.

Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp780.019.190,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp91.448.260,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp105.140.870,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp583.430.060,00 (100%).

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp8.349.499.513,00 Rp8.548.463.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri serta Hibah dari Kelompok. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.533.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.349.499.513,00 atau 110,83%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp198.963.487,00 atau 2,33% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.548.463.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Hibah				
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
a	Rupiah Murni	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri				
a	Dealer Otomotif	3.584.000.000,00	3.006.443.000,00	83,89	4.667.663.000,00
b	Main Dealer	25.500.000,00	28.200.000,00	110,59	28.800.000,00
c	PT Jasa Raharja	3.924.000.000,00	3.924.000.000,00	100,00	3.852.000.000,00
	Jumlah	7.533.500.000,00	6.958.643.000,00	92,37	8.548.463.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				
a	Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	110,83	8.548.463.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணுமடக நுமடக நுமடக ஸ்டுதெலபதலமரதுமுதலக

Tabel 5.19

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
I	Gaji dan Tunjangan				
a	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	727.915.094.758,00	694.268.754.825,00	33.646.339.933,00	95,38
b	Tunjangan Keluarga	56.891.691.953,00	52.885.141.977,00	4.006.549.976,00	92,96
c	Tunjangan Jabatan	12.730.808.404,00	12.008.289.000,00	722.519.404,00	94,32
d	Tunjangan Fungsional	35.974.646.250,00	34.630.413.000,00	1.344.233.250,00	96,26
e	Tunjangan Fungsional Umum	10.714.948.072,00	9.655.165.000,00	1.059.783.072,00	90,11
f	Tunjangan Beras	27.730.971.102,00	25.576.426.500,00	2.154.544.602,00	92,23
g	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.262.192.924,00	2.225.192.733,00	1.037.000.191,00	68,21
h	Pembulatan Gaji	18.769.966,00	7.484.577,00	11.285.389,00	39,88
i	Uang Paket	149.940.000,00	148.815.000,00	1.125.000,00	99,25
j	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	45.805.500,00	1.957.500,00	95,90
k	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	94.873.500,00	652.500,00	99,32
l	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00	51.156.000,00	261.000,00	99,49
m	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	9.722.250,00	1.500.750,00	86,63
n	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	94.090.500,00	47.654.250,00	46.436.250,00	50,65
o	Tunjangan Perumahan	13.761.600.000,00	13.658.600.000,00	103.000.000,00	99,25
p	Uang Jasa Pengabdian	33.300.000,00	2.250.000,00	31.050.000,00	6,76
q	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00
r	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdas	28.449.000,00	28.449.000,00	-	100,00
s	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	6.430.563.632,00	5.114.048.973,39	1.316.514.658,61	79,53
t	Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	48.583.966.441,00	42.402.641.465,00	6.181.324.976,00	87,28
u	Tunjangan Bahaya Radiasi	138.000.000,00	124.200.000,00	13.800.000,00	90,00
v	Tunjangan Reses	2.475.000.000,00	2.445.000.000,00	30.000.000,00	98,79
w	Tunjangan Transportasi	8.586.360.000,00	8.516.210.000,00	70.150.000,00	99,18
	Jumlah	956.086.322.002,00	904.306.293.550,39	51.780.028.451,61	94,58
II	Tambahan Penghasilan PNS				
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00	949.000.000,00	555.677.000,00	63,07
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	248.546.028.175,00	248.520.088.325,00	25.939.850,00	99,99
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	271.081.859.740,00	271.081.859.740,00	-	100,00
d	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	627.120.000,00	64.080.000,00	90,73
	Jumlah	521.823.764.915,00	521.178.068.065,00	645.696.850,00	99,88
III	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH				
a	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.825.000.000,00	75.000.000,00	99,24
b	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.589.000.000,00	2.589.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	12.489.000.000,00	12.414.000.000,00	75.000.000,00	99,40
IV	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				
a	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
	Jumlah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
V	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
a	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	254.731.196,00	233.283.854,00	21.447.342,00	91,58
b	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	723.489.356,00	490.020.776,00	233.468.580,00	67,73
c	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	11.769.600,00	11.769.000,00	600,00	99,99
	Jumlah	989.990.152,00	735.073.630,00	254.916.522,00	74,25
	Jumlah	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	52.790.624.193,61	96,55

Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dan realisasi sebesar Rp1.478.739.504.396,39 atau 96,55%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp1.478.739.504.396,39,00 mengalami kenaikan sebesar Rp183.034.574.104,39 atau 14,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.295.701.930.292,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp905.031.751.647,71 dan realisasi sebesar Rp782.830.947.893,01 atau 86,50%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp436.323.166.616,45 atau 35,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.219.154.114.509,46. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.677.843,00	19.488.864.840,00	1.135.813.003,00	94,49
2	Belanja Bahan/Material	72.181.497.829,18	63.498.920.943,00	8.682.576.886,18	87,97
3	Belanja Jasa Kantor	235.752.941.524,39	211.118.527.592,00	24.634.413.932,39	89,55
4	Belanja Premi Asuransi	1.303.627.200,00	1.232.049.442,00	71.577.758,00	94,51
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.638.956.415,00	15.641.565.381,00	1.997.391.034,00	88,68
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.955.961.330,23	20.294.260.476,00	1.661.700.854,23	92,43
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.668.683.887,00	5.218.149.047,00	1.450.534.840,00	78,25
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.541.710.500,00	2.625.071.300,00	1.916.639.200,00	57,80
9	Belanja Sewa Alat Berat	815.970.000,00	686.500.800,00	129.469.200,00	84,13
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.791.152.000,00	7.971.790.911,00	2.819.361.089,00	73,87
11	Belanja Makanan dan Minuman	37.767.103.700,00	32.863.848.500,00	4.903.255.200,00	87,02
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	719.305.000,00	689.710.000,00	29.595.000,00	95,89
13	Belanja Pakaian Kerja	2.811.342.000,00	2.596.892.750,00	214.449.250,00	92,37
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.217.612.250,00	3.059.712.850,00	157.899.400,00	95,09
15	Belanja Perjalanan Dinas	52.307.382.734,00	31.013.363.323,00	21.294.019.411,00	59,29
16	Belanja Pemeliharaan	47.069.947.711,00	44.570.085.445,01	2.499.862.265,99	94,69
17	Belanja Jasa Konsultansi	35.665.630.551,00	33.655.752.775,00	2.009.877.776,00	94,36
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.066.580.000,00	1.984.630.000,00	81.950.000,00	96,03
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.205.052.000,00	1.014.977.352,00	190.074.648,00	84,23
20	Honorarium PNS (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber)	26.070.264.500,00	21.570.564.500,00	4.499.700.000,00	82,74
21	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.040.084.160,00	4.266.200.000,00	773.884.160,00	84,65
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.799.307.573,91	59.250.219.679,00	28.549.087.894,91	67,48
23	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	3.012.199.948,00	95,74
24	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	1.381.536.969,00	84,48
25	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.433.024.059,00	99.582.403.024,00	7.850.621.035,00	92,69
26	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.650.000.000,00	1.536.600.000,00	113.400.000,00	93,13
27	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.224.700.000,00	22.092.740.000,00	131.960.000,00	99,41
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	120.350.000,00	112.397.000,00	7.953.000,00	93,39
Jumlah		905.031.751.647,71	782.830.947.893,01	122.200.803.754,70	86,50

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கல்வா உகவா உகவா கல்வா கல்வா கல்வா

Tabel 5.27
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	BOSNAS DIKDAS/SM	527.270.960.000,00	513.241.900.000,00	14.029.060.000,00	97,34
2	BOSDA SM SWASTA (Sekolah)	43.325.590.000,00	27.666.825.000,00	15.658.765.000,00	63,86
3	BOSDA SLB (Sekolah)	5.760.160.000,00	5.143.000.000,00	617.160.000,00	89,29
	Kelembagaan:			-	
4	Lembaga Orang Tua Asuh	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5	Kwarda DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
6	KONI DIY	29.000.000.000,00	8.997.000.000,00	20.003.000.000,00	31,02
7	NPC DIY	12.500.000.000,00	3.400.000.000,00	9.100.000.000,00	27,20
8	Dewan Pendidikan DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
9	PGRI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
10	KNPI DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	618.921.710.000,00	559.513.725.000,00	59.407.985.000,00	90,40

Penjelasan:

Hibah Urusan Pendidikan BOSNAS DIKDAS/SM merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta serta Satuan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp527.270.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp513.241.900.000,00 atau 97,34% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi BOS (Rp)
1	PROVINSI DIY	
	SMA Swasta	25.553.400.000,00
	SMK Swasta	66.475.200.000,00
	SLB Swasta	9.575.200.000,00
	Jumlah	101.603.800.000,00
2	KOTA YOGYAKARTA	
	SD Negeri	17.973.360.000,00
	SMP Negeri	11.257.180.000,00
	SD Swasta	18.607.050.000,00
	SMP Swasta	11.078.370.000,00
	Jumlah	58.915.960.000,00
3	KABUPATEN BANTUL	
	SD Negeri	49.297.020.000,00
	SMP Negeri	27.114.340.000,00
	SD Swasta	17.425.080.000,00
	SMP Swasta	8.142.320.000,00
	Jumlah	101.978.760.000,00
4	KABUPATEN KULON PROGO	
	SD Negeri	26.989.410.000,00
	SMP Negeri	14.450.940.000,00
	SD Swasta	6.404.280.000,00
	SMP Swasta	3.294.110.000,00
	Jumlah	51.138.740.000,00
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	SD Negeri	42.257.760.000,00
	SMP Negeri	21.946.640.000,00
	SD Swasta	5.915.130.000,00
	SMP Swasta	6.075.470.000,00
	Jumlah	76.195.000.000,00
6	KABUPATEN SLEMAN	
	SD Negeri	53.891.100.000,00
	SMP Negeri	26.443.550.000,00
	SD Swasta	26.758.050.000,00
	SMP Swasta	16.316.940.000,00
	Jumlah	123.409.640.000,00
	Jumlah Total	513.241.900.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தலம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

5) Hibah Urusan Pangan

Hibah Urusan Pangan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp230.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Pangan

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	KWT Anugrah Guwosari, Guwosari Pajangan Bantu	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
2	KWT Sarwodadi, Hargotirto Kokap Kulon Progo	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
3	KT. Margo Dadi, Girikerto Panggang Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
4	KWT. Srikandi, Trimurti Srandakan Bantul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	KT. Berkah Rejeki, Kalirejo Kokap Kulon Progo	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono Sentotlo Kulon Progo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
7	Gapoktan Wono Makmur, Wonokerto Turi Sleman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
Jumlah Total		230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00

6) Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Hibah dianggarkan sebesar Rp2.185.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.185.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	LPMK Bumijo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
2	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
3	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
4	LPMD Argomulyo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
5	LPMK Ngampilan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
6	LPMD Tamanmartani	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
7	LPMD Mulo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
8	LPMD Hargorejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00
9	LPMD Purwosari	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
10	LPMD Sumberagung	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00
11	TP PKK DIY	960.000.000,00	960.000.000,00	-	100,00
Jumlah Total		1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	-	100,00

7) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Hibah dianggarkan sebesar Rp805.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp557.508.600,00 atau 69,18% diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.

8) Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hibah dianggarkan sebesar Rp259.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.000.000,00 atau 100% diberikan kepada Koperasi PPDI DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தாபனம் கர்வா கர்வா ஸ்தாபனம் கர்வா ஸ்தாபனம் கர்வா ஸ்தாபனம்

9) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual dan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau 40%. Realisasi Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar Rp400.000.000,00 diberikan kepada MUI DIY sebesar Rp200.000.000,00 dan BAZNAS DIY sebesar Rp200.000.000,00.

10) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.000.000.000,00 atau 40%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No.	Penerima	Kabupaten/Kota	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	Kalurahan Ponjong	Gunungkidul	Pengembangan Sustainable Farming	1.000.000.000,00
2	Kalurahan Bleberan	Gunungkidul	Pengembangan Usaha Jamur Tiram, Green House dan Program Air Bersih	750.000.000,00
3	Pemdes Purwobinangun	Sleman	Pembangunan Akses Wisata di Destinasi Wisata Turgo	1.000.000.000,00
4	Kalurahan Pagerharjo	Kulon Progo	Penyempurnaan Camp, Rest Area Segitik, dan Pembangunan Toilet Wisata	750.000.000,00
5	Kalurahan Hargotirto	Kulon Progo	Pemb. Akses jalan Desa Wisata Segajih Hargotirto	250.000.000,00
6	Kalurahan Kenteng	Gunungkidul	Pemb. Jalan trap, hand railing, talud, dan gazebo di kawasan Goa Gilap	250.000.000,00
7	Kalurahan Pacarejo	Gunungkidul	Pemb. Gazebo dan Jogging Track	500.000.000,00
8	Kalurahan Katongan	Gunungkidul	Pembangunan Toilet dan Penataan Landscape	250.000.000,00
9	Kalurahan Umbulrejo	Gunungkidul	Aspal jalan dan rabat beton obyek wisata Goa Cokro	250.000.000,00
10	Kalurahan Purwosari	Kulon Progo	Pemb toilet 10 homestay, Akse wisata di Ayunan Langit Watu Jaran, Tempat ibadah, Gazebo	500.000.000,00
11	Kalurahan Sumbergiri	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00
12	Kalurahan Karangasem	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00
Jumlah				6.000.000.000,00

11) Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi

Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp5.315.200.000,00 dan tidak direalisasikan karena tidak terjadi erupsi merapi yang butuh penanganan pasca erupsi. Alokasi anggaran hibah untuk penanganan pasca erupsi Merapi berasal dari sisa sumbangan masyarakat ketika terjadi erupsi merapi.

12) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp102.460.490.600,00 dan realisasi Rp102.460.490.600,00 atau 100% diberikan kepada:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாடகா காவலாட்சி மாகாணம்

Tabel 5.51

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	3.011.232.000,00	2.817.757.910,00	193.474.090,00	93,57
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.731.904.140,00	6.144.704.140,00	587.200.000,00	91,28
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	276.223.600,00	246.095.150,00	30.128.450,00	89,09
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.321.521.700,00	1.796.768.500,00	524.753.200,00	77,40
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	36.444.000,00	33.439.000,00	3.005.000,00	91,75
7	Pengadaan Alat Ukur	1.314.495.550,00	1.144.606.750,00	169.888.800,00	87,08
8	Pengadaan Alat Pengolahan	594.116.500,00	578.210.000,00	15.906.500,00	97,32
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.870.000,00	25.445.000,00	425.000,00	98,36
10	Pengadaan Alat Kantor	15.844.280.120,00	10.253.912.632,00	5.590.367.488,00	64,72
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.331.346.440,00	13.317.988.416,00	1.013.358.024,00	92,93
12	Pengadaan Komputer	41.220.689.422,00	40.478.070.069,00	742.619.353,00	98,20
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.532.000,00	56.951.000,00	2.581.000,00	95,66
14	Pengadaan Alat Studio	3.839.251.200,00	3.625.963.278,00	213.287.922,00	94,44
15	Pengadaan Alat Komunikasi	357.030.500,00	354.722.000,00	2.308.500,00	99,35
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	186.511.000,00	174.151.000,00	12.360.000,00	93,37
17	Pengadaan Alat Kedokteran	273.926.950,00	264.677.450,00	9.249.500,00	96,62
18	Pengadaan Alat Kesehatan	170.840.000,00	150.465.000,00	20.375.000,00	88,07
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.399.301.684,00	2.354.555.554,00	44.746.130,00	98,14
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	32.249.280.200,00	31.189.767.948,00	1.059.512.252,00	96,71
21	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	90.550.000,00	87.202.000,00	3.348.000,00	96,30
22	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	1.370.588.000,00	1.035.459.432,00	335.128.568,00	75,55
23	Peralatan dan Mesin BOS	21.592.957.540,00	21.328.292.713,00	264.664.827,00	98,77
Jumlah		148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	75.270.327.375,00	70.776.144.829,00	4.494.182.546,00	94,03
2	Dinas Kesehatan	9.512.125.300,00	6.568.888.261,00	2.943.237.039,00	69,06
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.652.968.750,00	5.180.890.338,00	472.078.412,00	91,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	535.720.000,00	63.959.161,00	471.760.839,00	11,94
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	294.562.000,00	272.125.086,00	22.436.914,00	92,38
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.384.200,00	403.280.000,00	2.104.200,00	99,48
8	Dinas Sosial	2.269.684.500,00	2.181.335.841,00	88.348.659,00	96,11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	702.699.000,00	646.096.346,00	56.602.654,00	91,94
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	351.675.700,00	346.951.020,00	4.724.680,00	98,66
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	693.221.017,00	653.061.000,00	40.160.017,00	94,21
12	Dinas Perhubungan	958.222.000,00	773.623.189,00	184.598.811,00	80,74
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.053.863.450,00	25.865.757.286,00	188.106.164,00	99,28
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.899.078.800,00	1.261.157.500,00	637.921.300,00	66,41
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	75.298.000,00	73.598.000,00	1.700.000,00	97,74
16	Dinas Kebudayaan	7.476.370.684,00	6.680.624.813,00	795.745.871,00	89,36
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	325.635.270,00	316.057.000,00	9.578.270,00	97,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	447.196.000,00	446.306.000,00	890.000,00	99,80
19	Dinas Pariwisata	223.000.000,00	222.947.890,00	52.110,00	99,98
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.997.413.800,00	1.986.575.140,00	10.838.660,00	99,46
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	101.900.000,00	99.500.000,00	2.400.000,00	97,64
22	Sekretariat Daerah	5.021.514.000,00	4.934.406.945,00	87.107.055,00	98,27
23	Badan Penghubung Daerah	21.296.000,00	14.096.000,00	7.200.000,00	66,19
24	Sekretariat DPRD	1.931.630.000,00	1.911.752.041,00	19.877.959,00	98,97
25	Inspektorat	1.192.485.000,00	1.101.430.852,00	91.054.148,00	92,36
26	Paniradya Kaistimewan	1.418.364.200,00	1.288.914.500,00	129.449.700,00	90,87
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	323.827.000,00	316.152.000,00	7.675.000,00	97,63
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.615.043.500,00	2.579.495.904,00	35.547.596,00	98,64
29	Badan Kepegawaian Daerah	146.292.000,00	145.568.000,00	724.000,00	99,51
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	406.095.000,00	373.510.000,00	32.585.000,00	91,98
Jumlah		148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

19 melalui Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 78/KEP/2020. Selanjutnya mekanisme kerja Gugus Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 20 Maret - 29 Mei 2020.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 30 Mei - 30 Juni 2020.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 – 30 Juli 2020.
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Agustus 2020.
- 5) Keputusan Gubernur Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 30 September 2020.
- 6) Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Oktober 2020.
- 7) Keputusan Gubernur Nomor 318/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 30 November 2020.
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 358/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 - 31 Desember 2020.

Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Ketua Gugus Tugas COVID-19 membuat Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.
- 2) Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Operasi, yang berisi rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas COVID-19 yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan COVID-19 oleh masing-masing bidang dalam Gugus Tugas COVID-19.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தலம் கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
B.	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI				
1	Pemberian kerja darurat istimewa (PKDI)	1.022.400.000,00	1.020.258.000,00	2.142.000,00	99,79
2	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	106.000.000,00	45.985.000,00	60.015.000,00	43,38
3	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 6.000 buah	520.200.000,00	515.345.300,00	4.854.700,00	99,07
4	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 6.000 buah	298.200.000,00	189.237.000,00	108.963.000,00	63,46
5	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY	69.000.000,00	7.298.000,00	61.702.000,00	10,58
6	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Faceshield APD sebanyak 5.000 buah	375.000.000,00	245.653.000,00	129.347.000,00	65,51
7	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan masker kain 2 lapis sebanyak 10.200 buah	106.500.000,00	96.336.100,00	10.163.900,00	90,46
8	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Kantong Mayat sebanyak 100 buah	35.500.000,00	34.995.400,00	504.600,00	98,58
9	Pemberdayaan peternak sapi perah.	310.090.600,00	288.698.600,00	21.392.000,00	93,10
10	Pendistribusian bahan makanan	6.400.000,00	6.208.000,00	192.000,00	97,00
11	Pengadaan Sarana Prasarana untuk Penyimpanan Produk Pertanian	7.191.000,00	4.900.000,00	2.291.000,00	68,14
12	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan masker	316.368.000,00	197.448.000,00	118.920.000,00	62,41
13	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan wastafel gerabah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
14	Identifikasi dan inventarisasi kredit macet dan pembiayaan UMKM	76.325.000,00	24.078.000,00	52.247.000,00	31,55
15	Kemitraan UKM, Marketplace dan Jasa Pengiriman dalam distribusi produk KUMKM	750.928.000,00	460.283.225,00	290.644.775,00	61,30
16	Pemberdayaan Pelaku wisata di Destinasi Wisata dan Desa/Kampung Wisata	637.902.000,00	628.126.027,00	9.775.973,00	98,47
17	Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik	185.198.000,00	171.987.900,00	13.210.100,00	92,87
18	Media Campaign promosi digital	215.320.000,00	215.320.000,00	0,00	100,00
19	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Hygienitas Destinasi Wisata	240.600.000,00	234.600.000,00	6.000.000,00	97,51
20	Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (Brand Awareness) Masa Pemulihan	339.215.000,00	194.985.000,00	144.230.000,00	57,48
21	Pendampingan Simulasi dan Evaluasi SOP Hotel dan Restoran/Rumah Makan "New Normal" Di DIY	83.450.000,00	78.050.000,00	5.400.000,00	93,53
22	Koordinasi penyusunan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	34.750.000,00	25.000.000,00	9.750.000,00	71,94
23	Pemeliharaan Aset Daerah Terdampak	265.414.219,00	130.266.910,00	135.147.309,00	49,08
24	Pendampingan SOP New Normal Destinasi	83.650.000,00	83.650.000,00	0,00	100,00
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Cuci Tangan (wastafel) di Destinasi Wisata Strategis	30.897.510,00	22.594.000,00	8.303.510,00	73,13
26	Padat Karya Mandiri Destinasi Wisata	74.365.000,00	74.365.000,00	0,00	100,00
27	Pengadaan Sarana Kebersihan Desa Wisata	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
28	Persiapan Pembukaan TKM	58.708.500,00	42.328.500,00	16.380.000,00	72,10
29	Padat Karya Mandiri Desa/ Kampung Wisata	117.820.000,00	117.820.000,00	0,00	100,00
30	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	45.066.000,00	36.716.000,00	8.350.000,00	81,47
31	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	63.332.000,00	63.332.000,00	0,00	100,00
32	Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan	141.781.000,00	132.005.864,00	9.775.136,00	93,11



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦝꦠꦶꦱꦠꦺꦩꦤꦶꦪꦠꦤ꧀ꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
33	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	188.062.000,00	175.562.000,00	12.500.000,00	93,35
34	Peningkatan Kapasitas bagi UMKM	21.845.500,00	21.109.000,00	736.500,00	96,63
35	Media Campaign Pemulihan Ekonomi KUKM	185.925.000,00	185.565.000,00	360.000,00	99,81
36	Pendampingan Sertifikasi IUMK	148.552.000,00	145.880.000,00	2.672.000,00	98,20
37	Pendampingan Sertifikasi PIRT	148.573.000,00	145.907.000,00	2.666.000,00	98,21
38	Sosialisasi dan Pendampingan SOP di Desa/Kampung Wisata	131.514.000,00	130.954.000,00	560.000,00	99,57
39	Sosialisasi Pranatan Anyar di Sektor Perdagangan	93.701.000,00	93.601.000,00	100.000,00	99,89
40	Pelatihan Alih Teknologi Informasi (ATI)	155.195.000,00	154.295.000,00	900.000,00	99,42
41	Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	131.102.000,00	130.802.000,00	300.000,00	99,77
42	Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	135.438.000,00	135.398.000,00	40.000,00	99,97
43	Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura	235.022.000,00	199.284.364,00	35.737.636,00	84,79
44	Penumbuhan Wira Usaha Baru	172.530.000,00	171.366.000,00	1.164.000,00	99,33
45	Fasilitasi menuju Izin Edar Produk UMKM	68.920.000,00	67.240.500,00	1.679.500,00	97,56
46	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pranatan Anyar Plesiran Jogja pada Usaha Jasa Pariwisata	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00
47	Budi daya ilan di lahan sempeti (BUDILAMPIT)	225.575.000,00	210.005.908,00	15.569.092,00	93,10
48	Registrasi Kebun	38.475.000,00	38.445.000,00	30.000,00	99,92
49	Pemberdayaan Peternak Kambing Perah	94.150.000,00	92.850.000,00	1.300.000,00	98,62
50	Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Tenaga Kerja Dampak Covid-19	80.360.000,00	65.637.000,00	14.723.000,00	81,68
51	Promosi Pranatan Anyar Potensi Daerah untuk Pemulihan Ekonomi	189.700.000,00	172.322.727,00	17.377.273,00	90,84
	Sub Total	9.203.321.329,00	7.865.205.325,00	1.338.116.004,00	85,46
C.	PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL				
1	Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial terdampak Covid 19	174.378.000.000,00	159.658.400.000,00	14.719.600.000,00	91,56
2	Penyelenggaraan Dapur Umum	3.292.002.000,00	327.474.000,00	2.964.528.000,00	9,95
3	Pemberian bantuan sosial untuk penyandang disabilitas terdampak Covid 19	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	-
4	Pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar berupa sembako,tambahan gizi dalam rangka percepatan penanganan dampak covid 19	450.000.000,00	444.675.000,00	5.325.000,00	98,82
5	Jaminan Hidup ODP	107.530.000,00	0,00	107.530.000,00	-
6	Pengerahan anggota Tagana	1.849.820.000,00	838.670.000,00	1.011.150.000,00	45,34
7	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri	225.000.000,00	110.617.700,00	114.382.300,00	49,16
8	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri dan Penyandang disabilitas	230.700.000,00	227.887.500,00	2.812.500,00	98,78
9	Pendampingan Penyaluran Bantuan	26.460.000,00	2.797.500,00	23.662.500,00	10,57
10	Monev Tim	53.000.000,00	10.800.000,00	42.200.000,00	20,38
11	Biaya Pengiriman Bantuan	24.509.800,00	4.036.500,00	20.473.300,00	16,47
12	Operasional kesekretariatan	54.493.700,00	47.569.550,00	6.924.150,00	87,29
13	Bantuan Sosial untuk mahasiswa	280.556.500,00	263.083.200,00	17.473.300,00	93,77
14	Layanan Dukungan Psikososial	466.910.000,00	385.255.000,00	81.655.000,00	82,51
15	Fasilitasi Distribusi dan Bongkar Muat Logistik	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
16	Bantuan Sosial untuk bekas warga binaan Lembaga Pemasarakatan terdampak Covid-19	67.800.000,00	67.189.800,00	610.200,00	99,10



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Yogyakarta

NO.	URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
17	Penyelenggaraan Dapur Umum untuk Isolasi ASN Pemda DIY	48.804.000,00	0,00	48.804.000,00	-
	Sub Total	181.671.086.000,00	162.389.955.750,00	19.281.130.250,00	89,39
	Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.770,00	36.985.830.672,00	89,21

Belanja Tak Terduga dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang terdiri dari Sekretariat dan Bidang-bidang untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62

Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Satuan Gugus Tugas

No.	Uraian	SP2D	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat	16.691.216.601,00	14.942.235.794,45	1.748.980.806,55	89,52
2	Bidang Kesehatan	108.133.907.531,00	96.115.149.484,00	12.018.758.047,00	88,89
3	Bidang Sosial Kemasyarakatan	183.270.928.000,00	163.754.494.933,00	19.516.433.067,00	89,35
4	Bidang Ekonomi	8.725.211.110,00	7.545.202.515,27	1.180.008.594,73	86,48
5	Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	10.862.784.700,00	10.276.901.595,00	585.883.105,00	94,61
6	Bidang Pendidikan	3.586.395.000,00	2.842.028.391,00	744.366.609,00	79,24
7	Bidang Logistik	10.620.980.500,00	9.442.725.056,73	1.178.255.443,27	88,91
8	Bidang Komunikasi dan Informasi	733.760.000,00	720.615.000,00	13.145.000,00	98,21
	Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.769,46	36.985.830.672,55	89,21

5.1.2.4 Belanja Dana Keistimewaan Rp1.279.572.655.079,63 Rp1.166.576.228.221,39

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dan realisasi sebesar Rp5.433.564.049.791,03, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp1.286.576.228.221,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten/Kota untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp1.279.572.655.079,63 atau 96,94% sesuai dengan Berita Acara



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணு வாக நுவாக நுவாகு ஸூதலபதலபரத்யுதகதக

yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Capaian
I	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	14.554.390.500,00	13.266.845.421,00	1.287.545.079,00	91,15
1	Kota Yogyakarta	174.296.500,00	157.614.750,00	16.681.750,00	90,43
2	Kabupaten Bantul	1.270.319.000,00	1.185.032.400,00	85.286.600,00	93,29
3	Kabupaten Kulon Progo	1.289.277.500,00	1.247.489.300,00	41.788.200,00	96,76
4	Kabupaten Gunungkidul	1.213.190.900,00	1.065.057.521,00	148.133.379,00	87,79
5	Kabupaten Sleman	741.920.000,00	728.119.675,00	13.800.325,00	98,14
6	Biro Tata Pemerintahan	238.854.000,00	212.495.000,00	26.359.000,00	88,96
7	Biro Hukum Setda	325.000.000,00	302.111.200,00	22.888.800,00	92,96
8	Biro Organisasi	1.150.752.750,00	923.024.400,00	227.728.350,00	80,21
9	Paniradya Kaistimewan	7.755.231.850,00	7.057.635.675,00	697.596.175,00	91,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	195.548.000,00	193.685.500,00	1.862.500,00	99,05
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	194.580.000,00	5.420.000,00	97,29
II	KEBUDAYAAN	744.003.521.915,00	714.035.144.010,84	29.968.377.904,16	95,97
1	Kota Yogyakarta	11.986.349.265,00	11.627.809.886,84	358.539.378,16	97,01
2	Kabupaten Bantul	13.747.762.590,00	12.839.672.482,00	908.090.108,00	93,39
3	Kabupaten Kulon Progo	93.604.771.950,00	91.586.440.552,00	2.018.331.398,00	97,84
4	Kabupaten Gunungkidul	81.273.171.500,00	80.080.153.950,00	1.193.017.550,00	98,53
5	Kabupaten Sleman	40.789.854.150,00	40.420.852.720,00	369.001.430,00	99,10
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	657.225.882,00	76,70
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	183.994.000,00	183.994.000,00	-	100,00
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	3.859.991.949,00	89,36
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	864.876.500,00	626.484.000,00	238.392.500,00	72,44
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00
11	Dinas Sosial	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	341.254.730,00	85,92
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	797.875.500,00	714.697.500,00	83.178.000,00	89,58
13	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	182.000.000,00	175.140.400,00	6.859.600,00	96,23
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	905.903.827,00	97,67
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.081.965.250,00	3.842.226.000,00	239.739.250,00	94,13
16	Dinas Kebudayaan	276.814.504.942,00	261.666.622.714,00	15.147.882.228,00	94,53
17	Museum Negeri Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	900.354.612,00	92,78
18	Taman Budaya Yogyakarta	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	231.692.660,00	96,17
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	137.940.080,00	95,77
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.783.547.000,00	1.729.742.300,00	53.804.700,00	96,98
21	Dinas Pariwisata	6.927.825.500,00	5.041.079.190,00	1.886.746.310,00	72,77
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	13.787.450,00	98,99
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.076.626.500,00	3.696.064.350,00	380.562.150,00	90,66
24	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	224.676.000,00	213.216.000,00	11.460.000,00	94,90
25	Badan Penghubung Daerah	857.695.000,00	833.072.888,00	24.622.112,00	97,13
26	PPKD/ BUD	102.220.490.600,00	102.220.490.600,00	-	100,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.66

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (20 penerima)	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (50 orang)	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-
4	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur	286.000.000,00	286.000.000,00	-	100,00
5	Urusan Keistimewaan	53.712.360.784,00	53.113.338.517,42	599.022.266,58	98,88
Jumlah		54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	797.022.266,58	98,53

Tabel 5.67

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (350 penerima)	1.050.000.000,00	642.000.000,00	408.000.000,00	61,14
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 KPM)	57.000.000,00	-	57.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (215 orang)	645.000.000,00	-	645.000.000,00	-
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
5	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (29 penerima)	4.147.000.000,00	4.147.000.000,00	-	100,00
6	Bantuan Keuangan Pemilikada 2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00
7	Urusan Keistimewaan	19.708.493.490,00	18.260.701.557,00	1.447.791.933,00	92,65
Jumlah		30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	3.007.791.933,00	89,99

Tabel 5.68

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (374 penerima)	748.000.000,00	748.000.000,00	-	100,00
2	BKK RSUD Wates	63.688.067.675,00	63.688.067.675,00	-	100,00
3	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkar - Pantai Congot	780.000.000,00	-	780.000.000,00	-
4	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroyo, Kec, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	-	100,00
5	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 KPM)	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
6	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (180 orang)	540.000.000,00	-	540.000.000,00	-
7	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
8	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (3 penerima)	429.000.000,00	429.000.000,00	-	100,00
9	Urusan Keistimewaan	102.452.762.400,00	100.032.027.550,00	2.420.734.850,00	97,64
Jumlah		174.812.830.075,00	170.547.095.225,00	4.265.734.850,00	97,56



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.69

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (200 penerima)	600.000.000,00	354.000.000,00	246.000.000,00	59,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 KPM)	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (230 orang)	690.000.000,00	-	690.000.000,00	-
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
5	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (4 penerima)	572.000.000,00	572.000.000,00	-	100,00
6	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	100,00
7	Urusan Keistimewaan	87.909.776.537,00	85.579.025.848,21	2.330.750.688,79	97,35
Jumlah		94.793.776.537,00	91.005.025.848,21	3.788.750.688,79	96,00

Tabel 5.70

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (200 penerima)	800.000.000,00	800.000.000,00	-	100,00
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (150 orang)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
4	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (12 penerima)	1.716.000.000,00	1.716.000.000,00	-	100,00
5	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00
6	Urusan Keistimewaan	44.531.429.000,00	43.904.617.245,00	626.811.755,00	98,59
Jumlah		49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	626.811.755,00	98,72

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp1.345.000.000,00 Rp1.560.062.700,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.345.000.000,00 atau 100%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp215.062.700,00 atau sebesar 13,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.560.062.700,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71

Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Penguatan tebing pemukiman huntap Plosokerep	995.000.000,00	995.000.000,00	-	100,00
2	Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00
3	Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00
Jumlah		1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	-	100,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாண்டா காவா காவா காவா காவா காவா காவா காவா காவா

5.2. RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp420.567.958.995,42 Rp471.794.246.868,94

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp420.567.958.995,42 mengalami penurunan sebesar Rp51.226.287.873,52 atau 10,86% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp471.794.246.868,94. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2020.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 berasal dari:

Tabel 5.77

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan	5.611.510.924.299,71
2	Belanja dan Transfer	5.433.180.699.355,67
	Surplus (Defisit)	178.330.224.944,04
3	Penerimaan Pembiayaan	423.712.988.195,42
4	Pengeluaran Pembiayaan	(117.590.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	306.122.988.195,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	484.453.213.139,46

5.2.3. Sisa Anggaran Lebih Akhir Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

	33042/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	1.046.000,00
	33043/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	703.000,00
	33044/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	410.000,00
Dinas PUPESDM	00001/STS/BALAIPIALAM/01/2021	4 Januari 2021	1.334.000,00
Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	391/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	3.634.919,00
	390/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	48.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	00004/STS/2.17.01/A01/04/2020	1 April 2021	43.531.291,00
Jumlah			52.675.210,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp6.518.460,00 Rp7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2010. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.138.982.861,00 atau 99,91% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.145.501.321,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	6.921.089.344,00
	a. Setor Kas Daerah	0,00	142.500.000,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2019)	0,00	474.194.489,00
	c. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2020)	0,00	6.304.394.855,00
2.	Dinas Kebudayaan (Taman Budaya)	0,00	12.000.000,00
3.	PPKD	0,00	212.411.977,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.113.000,00	0,00
5.	Badan Kepegawaian Daerah	4.405.460,00	0,00
	Jumlah	6.518.460,00	7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.921.089.344,00 di dalamnya termasuk Saldo Kas BOS di sekolah sebesar Rp6.778.589.344,00. Dalam Neraca per 31 Desember 2020, sisa Kas BOS disajikan dalam akun Kas di Bendahara BOS. Penyajian didasarkan pada Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dimana salah satunya mengatur bahwa untuk pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Bendahara BOS. Untuk Tahun 2020 Bendahara BOS telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KEP/2020 tentang Penunjukkan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD Rp32.677.963.006,06 Rp27.714.169.998,06

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
69	SMA Negeri 1 Turi	-	132.696.800,00	132.696.800,00	132.696.800,00	-
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	1.275.850,00	530.456.796,00	711.732.646,00	707.756.485,00	3.976.161,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	-	1.338.387.182,00	1.338.387.182,00	860.856.000,00	477.531.182,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	-	6.087.758,00	6.087.758,00	6.087.758,00	-
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	-	244.028.500,00	244.028.500,00	244.028.500,00	-
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	-	122.159.350,00	122.159.350,00	122.159.350,00	-
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	-	-	-	-	-
77	SMK Negeri 1 Bantul	-	383.798.271,00	383.798.271,00	383.798.271,00	-
78	SMK Negeri 1 Dlingo	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	-	158.471.350,00	158.471.350,00	158.403.300,00	68.050,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	.044.135,00	44.347.570,00	96.391.705,00	96.391.705,00	-
81	SMK Negeri 3 Kasihan	-	57.347.806,00	57.347.806,00	57.347.806,00	-
82	SMK Negeri 1 Pajangan	-	7.733.370,00	7.733.370,00	7.733.370,00	-
83	SMK Negeri 1 Pandak	-	94.599.100,00	94.599.100,00	94.599.100,00	-
84	SMK Negeri 1 Pleret	-	78.050.554,00	78.050.554,00	78.050.554,00	-
85	SMK Negeri 1 Pundong	-	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-
86	SMK Negeri 1 Sanden	4.059.938,00	70.404.938,00	284.464.876,00	237.220.886,00	47.243.990,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	-	106.782.950,00	106.782.950,00	106.782.950,00	-
88	SMK Negeri 1 Sewon	-	381.678.000,00	381.678.000,00	366.578.000,00	15.100.000,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	-	76.467.500,00	76.467.500,00	76.467.500,00	-
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	-	-	-	-	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	-	-	-	-	-
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	6.557.643,00	199.828.170,00	226.385.813,00	224.948.506,00	1.437.307,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	-	1.965.826,00	1.965.826,00	1.965.826,00	-
94	SMK Negeri 1 Pengasih	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
95	SMK Negeri 2 Pengasih	-	27.412.441,00	27.412.441,00	27.412.441,00	-
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	-	43.993.250,00	43.993.250,00	43.993.250,00	-
97	SMK Negeri 1 Temon	50,00	430.812.825,00	430.812.875,00	430.812.875,00	-
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	-	27.835.550,00	27.835.550,00	26.950.000,00	885.550,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	-	12.504.400,00	12.504.400,00	12.503.755,00	645,00
100	SMK Negeri 1 Girisubo	-	132.064.820,00	132.064.820,00	82.064.820,00	50.000.000,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	-	67.651.414,00	67.651.414,00	67.651.414,00	-
102	SMK Negeri 1 Nglipar	-	28.139.539,00	28.139.539,00	28.139.530,00	9,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	-	49.851.425,00	49.851.425,00	48.861.000,00	990.425,00
104	SMK Negeri 1 Purwosari	-	39.231.325,00	39.231.325,00	39.061.000,00	170.325,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	-	-	-	-	-
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	-	4.137.215,00	4.137.215,00	4.137.215,00	-
107	SMK Negeri 1 Tepus	-	85.016.500,00	85.016.500,00	85.016.500,00	-
108	SMK Negeri 1 Wonosari	-	80.200,00	80.200,00	80.200,00	-
109	SMK Negeri 2 Wonosari	-	67.409.821,00	67.409.821,00	67.409.821,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦏꦂꦠ

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
110	SMK Negeri 3 Wonosari	-	-	-	-	-
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	-	43.298.109,00	43.298.109,00	43.298.109,00	-
112	SMK Negeri 1 Depok	-	33.018.800,00	33.018.800,00	33.018.800,00	-
113	SMK Negeri 2 Depok	-	36.466.864,00	36.466.864,00	36.466.000,00	864,00
114	SMK Negeri 1 Godean	-	43.641.612,00	43.641.612,00	43.641.612,00	-
115	SMK Negeri 2 Godean	-	40.913.860,00	40.913.860,00	40.913.860,00	-
116	SMK Negeri 1 Kalasan	-	19.421.920,00	19.421.920,00	19.421.920,00	-
117	SMK Negeri 1 Seyegan	156.660,00	34.299.540,00	34.456.200,00	34.456.180,00	20,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	-	70.442.900,00	70.442.900,00	70.442.900,00	-
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	-	912.500,00	912.500,00	912.500,00	-
121	SLB/C N Pembina	-	12.685.240,00	12.685.240,00	12.685.240,00	-
122	SLB N 1 Bantul	-	60.070.201,00	60.070.201,00	59.570.000,00	500.201,00
123	SLB N 2 Bantul	-	342.000,00	342.000,00	-	342.000,00
124	SLB N 1 Sleman	-	-	-	-	-
125	SLB N 1 Gunungkidul	-	29.605.350,00	29.605.350,00	29.605.350,00	-
126	SLB N 2 Gunungkidul	-	-	-	-	-
127	SLB N 1 Kulon Progo	-	1.629.400,00	1.629.400,00	1.629.400,00	-
	Jumlah	74.194.489,00	6.304.394.855,00	6.778.589.344,00	6.164.405.948,00	614.183.396,00

Tabel 5.82

Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.360.350.000,00	1.151.600.395,00	208.749.605,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.351.350.000,00	1.256.560.643,00	94.789.357,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.055.550.000,00	1.026.968.341,00	28.581.659,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.190.250.000,00	894.902.211,00	295.347.789,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.220.550.000,00	1.193.446.447,00	27.103.553,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.209.300.000,00	1.180.577.019,00	28.722.981,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.191.300.000,00	1.115.755.254,00	75.544.746,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.221.000.000,00	1.185.700.940,00	35.299.060,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	979.050.000,00	801.828.699,00	177.221.301,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	850.950.000,00	837.000.000,00	13.950.000,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.336.650.000,00	1.315.500.000,00	21.150.000,00
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	896.700.000,00	869.516.734,00	27.183.266,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	1.034.400.000,00	1.024.500.000,00	9.900.000,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	1.047.900.000,00	1.042.418.616,00	5.481.384,00
15	SMA Negeri 1 Bantul	1.332.000.000,00	1.313.994.841,00	18.005.159,00
16	SMA Negeri 2 Bantul	1.225.350.000,00	1.200.250.040,00	25.099.960,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	935.250.000,00	927.562.400,00	7.687.600,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	632.550.000,00	632.548.800,00	1.200,00
19	SMA Negeri 1 Imogiri	892.650.000,00	877.622.950,00	15.027.050,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுதல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல் காவல்

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
104	SMK Negeri 1 Purwosari	813.120.000,00	773.938.073,00	39.181.927,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	1.795.200.000,00	1.771.200.000,00	24.000.000,00
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	460.800.000,00	446.285.139,00	14.514.861,00
107	SMK Negeri 1 Tepus	742.720.000,00	598.456.627,00	144.263.373,00
108	SMK Negeri 1 Wonosari	2.084.640.000,00	2.051.126.336,00	33.513.664,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	2.368.320.000,00	2.317.069.294,00	51.250.706,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	1.743.680.000,00	1.702.400.000,00	41.280.000,00
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.506.720.000,00	1.328.846.419,00	177.873.581,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.426.560.000,00	1.352.638.750,00	73.921.250,00
113	SMK Negeri 2 Depok	3.869.280.000,00	2.991.002.447,00	878.277.553,00
114	SMK Negeri 1 Godean	1.600.320.000,00	1.413.432.043,00	186.887.957,00
115	SMK Negeri 2 Godean	1.222.400.000,00	1.119.903.727,00	102.496.273,00
116	SMK Negeri 1 Kalasan	1.853.120.000,00	1.807.373.632,00	45.746.368,00
117	SMK Negeri 1 Seyegan	2.224.000.000,00	2.118.828.806,00	105.171.194,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	1.564.640.000,00	1.514.320.661,00	50.319.339,00
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	185.800.000,00	177.792.115,00	8.007.885,00
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	192.600.000,00	189.395.491,00	3.204.509,00
121	SLB/C N Pembina	474.800.000,00	438.618.940,00	36.181.060,00
122	SLB N 1 Bantul	634.000.000,00	356.668.926,00	277.331.074,00
123	SLB N 2 Bantul	193.400.000,00	176.692.925,00	16.707.075,00
124	SLB N 1 Sleman	235.400.000,00	231.512.200,00	3.887.800,00
125	SLB N 1 Gunungkidul	319.000.000,00	239.347.400,00	79.652.600,00
126	SLB N 2 Gunungkidul	135.200.000,00	134.000.000,00	1.200.000,00
127	SLB N 1 Kulon Progo	377.600.000,00	365.907.865,00	11.692.135,00
	Jumlah	138.636.520.000,00	129.205.971.585,00	9.430.548.415,00

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp88.015,00

Rp12.987.501.459,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.015,00 merupakan penerimaan bunga pada Rekening Sumbangan Masyarakat Untuk Penanganan Covid-19 pada BPBD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Saldo Kas Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.987.501.459,00 yang merupakan Kas di Rekening SMA/SMK dari serah terima P3D sebesar Rp1.967.403.459,00 telah disetor ke Kas Daerah, sedangkan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri sebesar Rp8.399.331.000,00 dan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Swasta sebesar Rp2.620.767.000,00 telah disalurkan ke siswa yang berhak.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp5.339.277.997,85

Rp8.814.302.709,12

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.339.277.997,85 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريتا دايراه ايسيموا يوجياكارتا

Tabel 5.85

Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

No	Unit Kerja	Jumlah Kendaraan (Unit)	Nilai Tagihan (Rp)
1.	KPPD di Kota Yogyakarta	33.715	11.110.654.800,00
2.	KPPD di Kabupaten Bantul	44.225	15.129.800.500,00
3.	KPPD di Kabupaten Kulon Progo	13.692	3.518.953.600,00
4.	KPPD di Kabupaten Gunungkidul	21.907	4.986.239.300,00
5.	KPPD di Kabupaten Sleman	60.533	20.744.707.300,00
	Jumlah	174.072	55.490.355.500,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Rp1.847.960.188,00

Rp442.993.902,66

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.847.960.188,00 merupakan:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp489.293.338,00 dalam kondisi lancar.
- Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
- Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai PIALAM DPU ESDM sebesar Rp1.353.416.850,00 dalam kondisi lancar sebesar Rp944.224.875,00, kurang lancar sebesar Rp296.063.775,00 dan diragukan sebesar Rp113.128.200,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Rp3.320.144.809,85

Rp8.148.517.306,46

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.320.144.809,85 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00, Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30, dan Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86

Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	OPD	Saldo Awal 31-12-2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2020
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	229.568.281,55	-	12.570.000,00	216.998.281,55
	Jumlah	229.568.281,55			216.998.281,55
2.	BPKA				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	73.619.050,00	15.062.500,00	47.603.100,00	41.078.450,00
	Jumlah	75.669.050,00			43.128.450,00
3.	RS Ghrasia				
	Piutang BLUD	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00
	Jumlah	3.792.697.805,00			1.606.046.629,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	82.080.359,00	50.702.500,00	-	132.782.859,00
	Jumlah	82.080.359,00			132.782.859,00
5.	RS RESPIRA				
	Piutang BLUD	2.341.292.219,00	3.553.447.452,00	4.656.214.480,00	1.238.525.191,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

No	OPD	Saldo Awal 31-12-2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2020
	Jumlah	2.341.292.219,00			1.238.525.191,00
6.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.627.209.591,91	-	1.627.209.591,91	-
	Piutang Denda Retribusi	-	82.663.399,30	-	82.663.399,30
	Jumlah	1.627.209.591,91			82.663.399,30
	Jumlah Total	8.148.517.306,46			3.320.144.809,85

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020 dengan kondisi macet.

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

c. Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00

Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.606.046.629,00, Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp132.782.859,00, dan Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.238.525.191,00.

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.606.046.629,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp671.145.722,00, Piutang Diklat sebesar Rp16.535.000,00 dan Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp918.365.907,00, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.87

Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia

Uraian	Saldo 31-12-2019	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2020
Piutang Pasien Umum	656.335.376,00	14.810.346,00	-	671.145.722,00
Piutang Diklat	65.345.000,00	16.535.000,00	65.345.000,00	16.535.000,00
Piutang Jamkes	3.071.017.429,00	13.807.450.546,00	15.960.102.068,00	918.365.907,00
Jumlah	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang Rp(1.343.159.110,48) Rp(1.378.698.788,81)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.343.159.110,48) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(99.073.667,50), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(98.588.068,57), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.145.497.374,41) dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp(99.073.667,50) Rp(100.536.319,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(99.073.667,50) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(73.356.752,50) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(25.716.915,00).

Tabel 5.89

Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang		Total
		PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	
0 – 1 Tahun	Lancar	76.652,50	43.915,00	120.567,50
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	1.289.850,00	-	1.289.850,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	21.847.750,00	14.650.000,00	36.497.750,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	50.142.500,00	11.023.000,00	61.165.500,00
Jumlah		73.356.752,50	25.716.915,00	99.073.667,50

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi Rp(98.588.068,57) Rp(7.438.719,51)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp(98.588.068,57) terdiri dari:

Tabel 5.90

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Dinas Pariwisata	5.250.000,00	Macet	5.250.000,00
2	DLHK	489.293.338,00	Lancar	2.446.466,69
3	DPUP ESDM (Balai PIALAM)	944.224.875,00	Lancar	4.721.124,38
		296.063.775,00	Kurang Lancar	29.606.377,50
		113.128.200,00	Diragukan	56.564.100,00
	Total	1.847.960.188,00		98.588.068,57

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp(1.145.497.374,41) Rp(1.270.723.749,80)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.145.497.374,41) terdiri dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.91

Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
a.	PPKD	216.998.281,55	Macet	216.998.281,55
	Jumlah	216.998.281,55		216.998.281,55
b.	RS Ghrasia	106.004.959,00	Lancar	530.024,80
		801.172.800,00	Kurang Lancar	80.117.280,00
		8.114.520,00	Diragukan	4.057.260,00
		690.754.350,00	Macet	690.754.350,00
	Jumlah	1.606.046.629,00		775.458.914,80
c.	BLPT	50.702.500,00	Lancar	253.512,50
		82.080.359,00	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	132.782.859,00		82.333.871,50
d.	RESPIRA	1.238.525.191,00	Lancar	6.192.625,96
	Jumlah	1.238.525.191,00		6.192.625,96
e.	BPKA			
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	1.216.600,00	Lancar	6.083,00
		4.381.900,00	Kurang Lancar	438.190,00
		11.307.700,00	Diragukan	5.653.850,00
		24.172.250,00	Macet	24.172.250,00
	Jumlah	43.128.450,00		32.320.373,00
f.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)			
	Piutang Denda Retribusi	6.497.289,00	Lancar	32.486,45
		14.805.585,00	Kurang Lancar	1.480.558,50
		61.360.525,30	Diragukan	30.680.262,65
	Jumlah	82.663.399,30		32.193.307,60
	Total	3.320.144.809,85		1.145.497.374,41

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka Rp815.983.222,54 Rp680.855.777,20

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp815.983.222,54 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp679.839.158,65 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp136.144.063,89 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka Rp679.839.158,65 Rp598.825.183,60

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.228.422.242,11 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp548.583.083,46.

Premi Asuransi Tahun 2020 sebesar Rp1.228.422.242,11 merupakan:

1. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp584.237.923,11 dengan masa pertanggungans mulai 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.
2. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk Yogyakarta sebesar Rp644.184.319,00 dengan masa pertanggungans 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.

Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريته اقليم يوجياكرتا

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2020 sebesar Rp833.924.625,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96

Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	61.000,00	8.979,00	547.719.000,00
2.	BULOG	31.875,00	8.979,00	286.205.625,00
	Jumlah	92.875,00		833.924.625,00

Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

- b. Saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga dan sumbangan untuk penanganan Covid 19 pada BPBD sebesar Rp60.848.279.810,07, dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.97

Rincian Persediaan Dari Belanja Tidak Terduga dan Hibah

URAIAN	PERSEDIAAN		JUMLAH
	BTT	HIBAH	
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	1.425.103.710,07	7.220.422.461,00	8.645.526.171,07
BPBD	1.409.892.710,07	7.220.422.461,00	8.630.315.171,07
Dinas Komunikasi dan Informasi	15.211.000,00	-	15.211.000,00
BPKA	-	-	-
DINAS KESEHATAN	47.796.513.239,00	4.014.861.750,00	51.811.374.989,00
EKONOMI	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-
Dinas Industri dan Perdagangan	-	-	-
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	-
DINAS PENDIDIKAN	254.144.500,00	-	254.144.500,00
PENGAMANAN DAN GAKKUM	137.234.150,00	-	137.234.150,00
Satpol PP	137.234.150,00	-	137.234.150,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمرنتاه دايراه ايسيموا يوجياكارتا

Mutasi tambah sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan penambahan Dana Bergulir melalui BUKP. Mutasi kurang sebesar Rp3.157.529.300,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp55.000.000,00 , Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.102.529.300,00 dan BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.885.178.364,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya menjadi:

Tabel 5.100

Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	14.000.000.000,000
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	377.114.704,000
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	839.185.253,000
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.668.878.407,000
	Jumlah	18.885.178.364,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.196.182.503,90 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp14.688.995.860,10 (Rp18.885.178.364,00– Rp4.196.182.503,90).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

- Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala OPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UIKS Koperasi	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	150.000.000,00
Program Fasilitas Pengembangan Koperasi	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2013	6 Tahun	100%	168.057.582,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2014	6 Tahun	100%	239.912.400,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi)	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2014	6 Tahun	100%	400.736.502,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun	2015	5 Tahun	50%	92.454.650,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2016	4 Tahun	50%	43.280.089,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00		2019	1 Tahun	10%	3.865.220,40
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017	2017	3.175.000.000,00	178.140.700,00		2020	1 Tahun	10%	17.814.070,00
Fasilitas Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	160.321.800,00		2020	1 Tahun	10%	16.032.180,00
Jumlah			2.767.528.364,00					2.008.532.503,90
3 Dinas Kelautan dan Perikanan								
DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	Dec-13	7 Tahun	100%	133.500.000,00
Jumlah			133.500.000,00					133.500.000,00
4 BUKP								
BUKP	2018	2.000.000.000,00				1 Tahun	10%	-
BUKP	2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00			<1 Tahun	0,50%	50.000.000,00
BUKP	2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00			<1 Tahun	0,50%	20.000.000,00
Jumlah			14.000.000.000,00					70.000.000,00
JUMLAH TOTAL			18.885.178.364,00					4.196.182.503,90

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp1.640.658.177.122,57 Rp1.339.175.471.692,26

Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.658.177.122,57 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.339.175.471.692,26 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2019 sebesar Rp(37.311.816.753,01) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2019 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.301.863.654.939,25, ditambah penyertaan modal Tahun 2020 sebesar Rp101.090.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2019 yang disetor ke BUD Tahun 2020 sebesar Rp101.460.382.151,46 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY sebesar Rp147.343.223.644,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Perhitungan Penyertaan Modal

No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2019	Perhitungan Penyertaan Modal 2020				Mutasi Tahun Anggaran 2020					Penyertaan Modal 2020 (Laudited)
			% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2019 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2019 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2019	Tambahan Modal Disetor Tahun 2020	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2019 yang Disetor ke BUD Tahun 2020	Labar/Rugi BUMD Tahun 2020	Labar/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 4+6-8+10
METODE EKUITAS												
1	PT. Bank BPD DIY	1.196.262.377.102,21	51,000%	2.279.614.000.000,00	1.162.603.140.000,00	(33.659.237.102,21)	101.000.000.000,00	51,000%	94.001.713.614,26	243.980.043.013,00	124.429.821.936,63	1.294.031.248.322,37
2	PT. Anindya Mitra Internasional	42.797.239.256,02	99,951%	40.276.493.418,00	40.256.757.936,23	(2.540.481.319,80)	-	99,951%	1.185.651.326,00	3.555.003.551,00	3.553.261.599,26	42.624.368.209,49
3	PT. Tarumartani	52.427.479.342,79	99,996%	52.164.149.040,00	52.162.062.474,04	(265.416.868,75)	-	99,996%	148.697.632,00	9.593.905.721,00	9.593.521.964,77	61.606.886.806,81
4	BUKP	47.028.375.991,24	83,140%	55.546.902.248,00	46.181.694.528,99	(846.681.462,25)	-	83,140%	6.025.001.568,20	11.747.195.265,96	9.766.618.144,11914	49.923.311.104,91
5	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY		100,000%	-	-	-	191.722.362.679,00	100,000%	-	-	-	191.722.362.679,00
METODE HARGA PEROLEHAN												
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	660.000.000,00	0,223%		660.000.000,00		90.000.000,00	0,223%	99.318.011,00			750.000.000,00
TOTAL SELURUHNYA		1.339.175.471.692,26			1.301.863.654.939,25	(37.311.816.753,01)	101.090.000.000,00		101.460.382.151,46	268.876.147.550,96	147.343.223.644,78	1.640.658.177.122,57



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.294.031.248.322,37. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited		Rp	1.196.262.377.102,21
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(33.659.237.102,21)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2020		Rp	1.162.603.140.000,00
Tambahan Modal		Rp	101.000.000.000,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(94.001.713.614,26)
Laba Tahun 2020	Rp243.980.043.013,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	51,00%	Rp	124.429.821.936,63
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	1.294.031.248.322,37

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.624.368.209,49 Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	42.797.239.256,02
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(2.540.481.319,80)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	40.256.757.936,23
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(1.185.651.326,00)
Laba Tahun 2020	Rp 3.555.003.551,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp	3.553.261.599,26
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	42.624.368.209,49

- c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp61.606.886.806,81. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	52.427.479.342,79
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited		Rp	(265.416.868,75)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	52.162.062.474,04
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020		Rp	(148.697.632,00)
Laba Tahun 2020	Rp 9.593.905.721,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	9.593.521.964,77
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020		Rp	61.606.886.806,81



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

- d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp49.923.311.104,91. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited	Rp	47.028.375.991,24
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited	Rp	(846.681.462,25)
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019	Rp	46.181.694.528,99
Tambahan Modal	Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020	Rp	(6.025.001.568,20)
Laba Tahun 2020	Rp	11.747.195.265,96
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	Rp	9.766.618.144,12
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020	Rp	49.923.311.104,91

- e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp191.722.362.679,00. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited	Rp	0,00
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2019 Audited	Rp	0,00
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019	Rp	0,00
Tambahan Modal	Rp	191.722.362.679,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2020	Rp	0,00
Laba Tahun 2020	Rp	00,00
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	Rp	0,00
Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2020	Rp	191.722.362.679,00

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Air Bersih Tirtatama yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Penyertaan Modal Pemda DIY pada Perusda Air Bersih Tirtatama dilakukan berdasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang senilai Rp179.222.362.679,00.

- f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2020 sebesar Rp750.000.000,00. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp90.000.000,00. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,223% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3 Aset Tetap Rp8.479.112.482.546,08 Rp7.872.445.226.240,18

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp12.080.309.111.026,30 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.601.196.628.480,27, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉ கழவாஉ கழகாழிதாபாதுபாதுபாது

No	Uraian	Nilai (Rp)
35	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.783.659.090,16
36	Alat Khusus Kepolisian	1.039.986.798,98
37	Alat Eksplorasi Topografi	4.925.000,00
38	Alat Eksplorasi Geofisika	69.815.000,00
39	Sumur	7.000.000,00
40	Pengolahan dan Pemurnian	25.000.000,00
41	Alat SAR	1.941.343.150,00
42	Alat Kerja Penerbangan	45.119.000,00
43	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	140.084.502,00
44	Unit Peralatan Proses/Produksi	2.067.989.820,00
45	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	95.712.203.295,04
46	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	3.196.565.200,00
47	Peralatan Olahraga	3.658.485.146,91
	Jumlah	1.512.711.423.026,27

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	508.085.882.205,63	419.108.648.161,68
2	Dinas Kesehatan	119.498.221.916,78	114.683.147.117,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	63.604.731.940,00	61.987.876.669,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.483.404.722,03	14.916.806.921,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.363.945.241,98	4.216.575.335,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.939.862.238,00	7.933.854.388,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.924.966.563,18	25.437.267.583,00
8	Dinas Sosial	27.472.254.938,08	25.554.632.677,23
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.603.345.887,98	32.563.868.019,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.682.149.502,00	6.481.424.034,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.901.527.431,98	49.180.637.081,98
12	Dinas Perhubungan	130.845.462.108,79	32.469.725.704,75
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.414.400.542,77	44.741.827.091,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.477.447.600,00	4.400.863.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.516.916.574,91	4.571.820.315
16	Dinas Kebudayaan	70.804.553.795,76	67.721.154.042,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	48.627.523.677,90	49.197.055.506,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.721.220.484,98	18.671.866.674,18
19	Dinas Pariwisata	3.540.826.192,01	3.451.656.192,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.135.526.668,83	37.273.756.821



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தாபனம் கர்வா கர்வா ஸ்தாபனம் கர்வா ஸ்தாபனம் கர்வா ஸ்தாபனம்

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.066.231.232,00	15.958.938.892,00
22	Sekretariat Daerah	49.901.122.450,78	50.652.983.334,03
23	Badan Penghubung Daerah	7.066.553.007,00	6.460.497.007,00
24	Sekretariat DPRD	24.585.196.643,59	22.572.323.352,59
25	Inspektorat	4.425.161.733,42	3.573.190.733,00
26	Paniradya Kaistimewan	4.859.658.941,96	4.469.067.275,96
27	Badan Perencanaan Daerah	11.993.454.938,00	12.128.241.458,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	88.334.009.491,93	95.576.023.468,93
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.674.434.109,00	13.249.555.830,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9.161.430.245,00	8.760.438.945,00
	Jumlah	1.512.711.423.026,27	1.257.965.724.234,31

Mutasi Peralatan Mesin sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	1.257.965.724.234,31
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	137.484.204.942,00
Koreksi pencatatan Meubelair	2.811.599,75
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	346.162.500,00
reklas dari AT lainnya	1.921.479.621,91
Reklas dari gedung dan bangunan	95.739.812.919,04
Hibah	35.881.338.473,22
Reklas dr JIJ	2.337.773.745,00
Reklas dari Persediaan	751.348.780,00
Penyesuaian Aset	2.653.045.743,64
Reklas dari KDP	1.631.133.693,75
Reklas dari Beban Jasa Konsultansi Penelitian	188.295.800,00
Reklas Extracom dari Gedung Bangunan	100.271.200,00
Reklas Pemetaan dari Gedung Bangunan	780.606.000,00
Mapping Alat Olahraga	2.339.000,00
Reklas Mutasi Kendaraan dari Banhubla	140.000.000,00
Reklas Belanja Barang Jasa ke Aset	6.350.000,00
Reklas Headset dan Mic	1.750.000,00
Peralatan mesin dari dana BTT	6.990.214.113,18
reklas dari barang dan jasa	55.594.000,00
Reklas dari Tanah	5.271.378.000,00
Kapitalisasi alat kedokteran (IR Thermometer)	3.420.000,00
Reklas antar AT	49.850.000,00
Pemetaan Aset	34.545.000,00
Reklas antar rekening AT	14.000.000,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	1.332.350.384,00
	293.720.075.515,49
Pengurangan:	



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦏꦼꦢꦼꦂꦏꦼꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦼꦠꦏꦺꦴꦫꦏꦂꦠ

Penghapusan	2.483.081.445,00
Reklas ke ALL	12.751.109.959,00
Reklas ke persediaan	419.084.932,27
Reklas mini komputer	590.000,00
Ekstrakom	3.611.238.203,38
Hibah ke TNI AU	504.285.000,00
Koreksi	1.870.297.031,02
Pengembalian Belanja Modal LS temuan	16.389.890,00
Reklas Aset Tetap	123.648.094,00
Reklas ke aset tetap lainnya	224.554.000,00
Reklas ke beban	27.393.837,00
Reklas ke Gedung	2.294.166.020,00
Reklas ke JIJ	36.000.000,00
Mutasi Antar OPD	10.822.037.344,86
Koreksi dari jurnal penyesuaian	3.790.500.967,00
	38.974.376.723,53
Saldo akhir per 31 Desember 2020	1.512.711.423.026,27

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.512.711.423.026,27 termasuk di dalamnya Peralatan Mesin yang terdapat di dalam Hotel Mutiara Utara dan Selatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	HOTEL MUTIARA UTARA		HOTEL MUTIARA SELATAN		Jumlah	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	ALAT BESAR DARAT	-	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00
2	ALAT BANTU	6	1.422.195.000,00	8	1.399.450.000,00	14	2.821.645.000,00
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	4.011.000,00	6	5.730.000,00	9	9.741.000,00
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	5.050.000,00	-	-	1	5.050.000,00
5	ALAT KANTOR	1	1.877.000,00	81	58.330.000,00	82	60.207.000,00
6	ALAT RUMAH TANGGA	522	517.593.000,00	613	1.144.858.000,00	1135	1.662.451.000,00
7	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1	3.360.000,00	11	11.169.000,00	12	14.529.000,00
8	ALAT STUDIO	-	-	3	5.338.000,00	3	5.338.000,00
9	ALAT KOMUNIKASI	2	4.747.000,00	-	-	2	4.747.000,00
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	8	22.800.000,00	8	22.800.000,00
11	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	6.052.000,00	-	-	1	6.052.000,00
12	PERALATAN KOMPUTER	1	1.500.000,00	1	1.400.000,00	2	2.900.000,00
13	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA			2	64.815.000,00	2	64.815.000,00
		JUMLAH				1272	4.684.275.000,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp2.854.877.023.082,53

Rp2.853.277.179.121,12

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.854.877.023.082,53 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.108

Rincian Obyek Gedung dan Bangunan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.727.350.024.595,72
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	105.489.865.092,99
3	Bangunan Menara	721.228.000,00
4	Bangunan Bersejarah	12.227.556.007,98
5	Tugu Peringatan	2.290.980.501,00
6	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.095.594.400,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.701.774.484,84
8	Rambu-Rambu	-
9	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-
Jumlah		2.854.877.023.082,53

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	948.846.560.411,69	894.132.203.275,15
2	Dinas Kesehatan	112.142.180.134,00	111.181.848.740,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	119.983.958.434,30	128.064.123.684,30
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.399.748.597,00	21.320.160.229,83
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.853.306.893,00	2.853.306.893,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.573.288.429,00	4.470.115.429,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.308.799.350,00	9.388.974.350,00
8	Dinas Sosial	93.487.735.788,65	93.135.907.225,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.823.742.414,00	27.508.938.468,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	20.832.031.220,00	20.769.094.720,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.474.866.728,94	38.392.970.728,94
12	Dinas Perhubungan	39.818.633.478,07	129.898.249.604,25
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.750.625.336,00	4.750.625.336,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.578.499.210,00	12.402.404.100,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.441.903.500,00	2.219.578.000,00
16	Dinas Kebudayaan	138.220.125.755,00	109.019.419.069,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	132.805.459.748,81	132.805.459.748,81
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.641.224.887,98	72.562.143.887,98
19	Dinas Pariwisata	41.712.073.651,00	38.399.222.341,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	106.985.252.441,48	103.339.786.171,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.241.243.075,00	20.149.036.175,00
22	Sekretariat Daerah	34.280.687.308,61	34.086.394.542,61
23	Badan Penghubung Daerah	6.370.571.262,00	6.370.571.262,00
24	Sekretariat DPRD	575.221.451.533,00	575.221.451.533,00
25	Inspektorat	929.006.440,00	929.006.440,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.989.171.200,00	4.956.145.200,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவாடகாபாடகாபாடகாபாடகாபாடகாபாடகா

Reklas ke Persediaan	3.808.750,00
Mutasi ke OPD lain pada Distarung	3.374.711.633,00
Mutasi ke BPTPAR dari Dishub Induk	9.996.080.615,07
Mutasi keluar OPD dari BPKA	64.480.911.081,10
Reklas antar AT	14.000.000,00
Hibah ke Pemkab Bantul	3.374.711.633,00
Reklas ke ATR	3.478.591.400,00
	222.260.844.577,45
Saldo akhir per 31 Desember 2020	2.854.877.023.082,53

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp3.159.549.339.267,57 Rp3.056.004.711.149,57

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.159.549.339.267,57 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan	1.943.928.622.776,59
2	Jembatan	339.871.230.667,00
3	Bangunan Air Irigasi	286.085.588.537,56
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.894.008.246,00
5	Bangunan Air Rawa	19.583.000,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.956.522.944,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	35.821.109.505,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	24.055.919.676,42
9	Bangunan Air Kotor	31.500.946.731,00
10	Bangunan Air	84.230.180.327,00
11	Instalasi Air Minum Bersih	7.552.746.132,54
12	Instalasi Air Kotor	61.887.225.028,68
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	1.580.852.185,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	5.718.767.599,68
15	Instalasi Gardu Listrik	1.704.655.306,52
16	Instalasi Pertahanan	233.906.133,34
17	Instalasi Gas	82.236.666,67
18	Instalasi Pengaman	10.347.843.493,00
19	Jaringan Air Minum	194.797.254.966,57
20	Jaringan Listrik	73.275.439.040,44
21	Jaringan Telepon	19.937.333.604,56
22	Jaringan Gas	67.366.700,00
	Jumlah	3.159.549.339.267,57



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெர்தா கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம்

Kapitalisasi dari beban pemeliharaan JIJ	635.953.384,00
Reklas dari PM	470.495.190,00
Reklas dari KDP	163.203.403,00
Hibah	9.469.361.121,00
Reklas dari ATR	75.935.689.612,00
Reklas dari Gedung Bangunan	5.214.541.440,00
Reklas dari ATB	25.500.000,00
Mutasi dari BPKA ke Balai Pialam	117.812.761.349,00
Mutasi dari BPBD ke Dinas Kanla	436.427.000,00
Mutasi dari luar OPD ke BPKA	53.154.739.562,10
Reklas dari tanah	27.159.000,00
Penyesuaian	83.826.409,09
	301.561.216.992,19
Pengurangan:	
Reklas ke PM	604.106.500,00
Reklas ke ATR	8.140.188.400,00
Penyesuaian SA	33.826.409,19
Pelimpahan dari DPU ke PBD-BPKA	186.948.901.084,00
Reklas ke KDP	317.655.600,00
Reklas ke Beban	5.196.000,00
Reklas ke persediaan	40.880.064,00
Hibah ke Pemkab Bantul	1.825.206.367,00
Pengembalian Belanja Modal	100.628.450,00
	198.016.588.874,19
Saldo akhir per 31 Desember 2020	3.159.549.339.267,57

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp241.819.072.793,33

Rp296.525.642.342,22

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.819.072.793,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.112

Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Buku	119.149.729.945,70
2	Terbitan	227.433.064,94
3	Barang-Barang Perpustakaan	928.147.565,59
4	Barang Bercorak Kebudayaan	34.188.552.105,28



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா குடியரசு கருவா கருவா கருவா குடியரசு கருவா கருவா

5	Alat Olah Raga Lainnya	-
6	Hewan	1.777.727.889,98
7	Tanaman	1.689.150.951,20
8	Aset Tetap Renovasi	83.858.331.270,64
	Jumlah	241.819.072.793,33

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	122.973.354.208,50	110.571.238.582,01
2	Dinas Kesehatan	430.998.256,00	581.577.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	48.515.874.849,00	72.371.059.065,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	16.195.115.915,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.659.900,00	16.659.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.549.511.674,64	52.819.709.396,00
8	Dinas Sosial	559.025.787,00	592.019.287,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	41.418.900,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.101.417.987,00	1.128.499.187,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	85.835.001,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.765.917.400,00	5.700.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan	5.265.213.088,00	8.102.221.943,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.158.606.976,00	10.128.605.776,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	392.770.500,00	392.770.500,00
19	Dinas Pariwisata	34.774.000,00	34.774.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.895.709.670,18	2.217.865.955,20
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.455.999.950,00	2.217.246.870,00
22	Sekretariat Daerah	11.243.067.448,00	11.247.576.448,00
23	Badan Penghubung Daerah	3.278.395.650,00	3.263.945.650,00
24	Sekretariat DPRD	828.740.552,01	844.874.502,01
25	Inspektorat	37.427.461,00	37.427.461,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தாபனம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

26	Paniradya Kaistimewan	14.267.700,00	12.365.700,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.983.840,00	82.858.840,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	233.903.692,00	2.599.756.390,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	672.628.450,00	723.309.750,00
	Jumlah	241.819.072.793,33	296.525.642.342,22

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	296.525.642.342,22
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	15.382.208.041,00
Reklas dari KDP keATR	8.466.433.388,00
Reklas dari JIJ ke ATR	452.247.400,00
Reklas dari PM	97.658.000,00
reklas dari persediaan	420.203.800,00
Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung	6.450.000,00
Hibah	30.001.200,00
Penyesuaian	67.912.830,05
Reklas dari tanah	9.861.000,00
Mutasi ATR dari BPKA ke DPU	1.261.338.500,00
Reklas dari ATB ke ATR	47.647.000,00
Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR	3.478.591.400,00
	26.241.961.159,05
Pengurangan:	
Reklas ke PM	1.847.610.621,91
Penghapusan	1.547.260.420,00
Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk	1.647.800,00
Reklas asset tetap lainnya krn mapping kode baru	539.053.998,54
Penyesuaian Saldo Awal Aset	831.090.266,70
penyesuaian akhir	270.600.713,06
penyesuaian mapping	304.103.165,35
Reklas ke ALL	537.126.285,00
Reklas ke Extracom	30.850.000,00
Reklas ke KDP	121.798.000,00
Kapitalisasi ATR ke JIJ	25.011.890.716,00
Kapitalisasi ATR ke Gedung Bangunan	152.279.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦺꦩꦶꦠꦫꦺꦝꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

3	Dinas Kelautan dan Perikanan	355.578.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo	
4	Sekretariat Daerah (Biro Umum	10.481.187.069,00	Bangunan Gedung milik Kraton Yogyakarta	
5	Badan Penghubung Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SETNEG	
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.470.043.674,64	Jalan Barongan-Bibal	4.366.776.074,64
			Jalan Sedayu-Pandak	3.231.542.600,00
			Jalan Imogiri-Dodogan	532.048.000,00
			SLB BINA SIWI	339.677.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.460.782.400,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA	
Jumlah		83.858.331.270,64		

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp72.397.801.549,65 Rp89.827.616.353,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.397.801.549,65 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini:

Tabel 5.115

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.352.908.232,65	4.029.820.833,40
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	77.008.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.628.877.670,00	30.456.449.748,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	20.985.079.930,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	153.367.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-
7	Dinas Sosial	484.557.500,00	138.302.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	130.014.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	2.596.357.100,00
10	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	513.868.450,00
11	Dinas Kebudayaan	1.495.029.592,00	2.234.597.092,00
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	785.658.000,00	49.560.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	86.433.000,00
15	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	15.700.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	-
18	Sekretariat Daerah	81.912.600,00	-
19	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp577.406.280,99 terdiri dari Pembangunan Gedung SMKN 6 sebesar Rp528.369.900,00, dan Pembangunan Gedung SMKN 4 sebesar Rp49.036.380,99.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan.

c. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah.

d. Inspektorat

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Inspektorat sebesar Rp13.476.942.500,00 merupakan pembangunan gedung kantor.

Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	89.827.616.353,40
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	-
Kapitalisasi dari Jasa Konsultasi	3.336.988.810,00
Reklas dari Gedung Bangunan	62.386.085.779,00
Reklas dari JIJ	69.778.000,00
Reklas dari belanja barang dan jasa	168.963.000,00
Reklas dari Beban Pemeliharaan	11.791.384,00
Hibah	321.994.096,00
Reklas dari Beban Makan dan Minum	28.853.350,00
Penyesuaian saldo awal	507.134.400,00
Reklas dari PM	120.526.000,00
Reklas dari ATB	144.710.840,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	39.157.670,00
	67.135.983.329,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung dan Bangunan	5.771.162.911,00
Mutasi ke dikmen GK	4.040.000.000,00
Mutasi ke dikmen KP	900.000.000,00
Mutasi ke dikmen	22.969.088.888,00
Reklas ke JIJ	19.652.847.434,00
Reklas PM	375.032.431,75
Penyesuaian saldo awal	5.670.637.200,00
Hibah	574.010.358,00
Reklas ke JIJ	10.985.183.170,00
Mutasi ke OPD lain dari Distarung	89.042.240,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پەمەرنتھا داەرھا ائستیمەوا یوگیاکارتا

Reklas ke PM dan Gedung dan Bangunan	183.899.000,00
Penghapusan	13.354.894.500,00
	84.565.798.132,75
Saldo akhir per 31 Desember 2020	72.397.801.549,65

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 termasuk di dalamnya saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dan sumbangan/hibah untuk penanganan Covid 19, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117

Rincian Aset Tetap Berasal Dari Belanja Tidak Terduga

URAIAN	NILAI (Rp)		JUMLAH	KETERANGAN
	BTT	HIBAH		
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	2.745.937.491,91	1,00	2.745.937.492,91	
BPBD	1.723.586.091,91	1,00	1.723.586.092,91	Hibah Ambulans 1 unit
Dinas Kominfo	1.018.391.400,00	-	1.018.391.400,00	
BPKA	3.960.000,00	-	3.960.000,00	
DINAS KESEHATAN	3.298.619.548,00	2,00	3.298.619.550,00	Hibah Ventilator 2 unit
EKONOMI	374.011.640,00	-	374.011.640,00	
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	125.261.640,00	-	125.261.640,00	
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4.900.000,00	-	4.900.000,00	
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	-	
Dinas Koperasi Dan Umkm	157.500.000,00	-	157.500.000,00	
Dinas Pariwisata	-	-	-	
Dinas Industri Dan Perdagangan	-	-	-	
Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal	86.350.000,00	-	86.350.000,00	
DINAS PENDIDIKAN	242.314.251,23	-	242.314.251,23	
PENGAMANAN DAN GAKKUM	243.100.000,00	-	243.100.000,00	
SATPOL PP	92.150.000,00	-	92.150.000,00	
Dinas Perhubungan	150.950.000,00	-	150.950.000,00	
Badan Kesbangpol	-	-	-	
SOSIAL KEMASYARAKATAN	25.500.000,00	-	25.500.000,00	
LOGISTIK	85.763.636,36	-	85.763.636,36	
JUMLAH	7.015.246.567,50	3,00	7.015.246.570,50	

**5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(3.601.196.628.480,31) Rp
(3.244.299.445.623,34)**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.601.196.628.480,31) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118

Rincian Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

Mencatat kembali Extracom ke Aset Lain-Lain	32.668.214,00
Aset Tak Berwujud	834.407.500,00
	58.720.983.746,67
Pengurangan:	
Akumulasi penyusutan ALL	5.507.649.910,58
Penghapusan ALL	14.095.005.864,09
Reklas dari Kemitraan ke Gedung dan Bangunan	87.743.866.245,00
Penyesuaian Saldo Awal	1.337.420.162,70
Penyesuaian saldo awal Akumulasi Aset lain2	50.528.061,16
Reklas ke beban jasa	889.336,00
Akum penyusutan sewa	157.631.508,00
Mutasi ke Kominfo (Software) dari Disbud	191.210.000,00
Mutasi ke Kominfo (Kajian) dari Disbud	473.247.500,00
Mutasi ALL ke BPKA	575.706.000,00
Koreksi Aset Non Lancar Lainnya (Lebih Catat)	54.797,00
Aset Non Lancar lainnya berkurang karena jaminan dicairkan	336.430.326,00
Reklas ATB ke KDP	559.912.240,00
Reklas ke JIJ	25.500.000,00
Reklas Akm ALL ke Akm.pny Peralatan mesin	184.555.410,00
Sewa mutasi keluar OPD	10.813.404.510,00
Pembebanan Akum Penyusutan Sewa	839.044.015,87
Penghapusan Akum Penyusutan Kemitraan	110.015.701,84
Penyesuaian SA Akum Peny Sewa	2.366.400,00
Akumulasi Penyusutan Sewa	4.311.204,20
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Gedung Bangunan	76.152.543,00
Koreksi BPK	12.012.500,00
Penghapusan ALL	2.335.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.533.219,00
Reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	59.592.000,00
Pengurangan ATB	5.000.000,00
	123.169.374.454,44
Saldo akhir per 31 Desember 2020	529.075.861.801,14

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp257.752.887.426,96 Rp325.881.130.128,87

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp257.752.887.426,96 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp270.777.930.697,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.025.043.270,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦺꦴꦗꦴꦏꦂꦠ

5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code	Masyarakat umum
			Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) Rumah Dinas Randubelang	Pegawai dan masyarakat umum
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum Masyarakat umum
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	64.341.655.798,00	Tanah dan Bangunan	
Jumlah		84.570.590.478,93		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut :

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
BPKA INDUK				
TANAH				
1	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian Tebu	279.542.000,00
2	Tanah	Hargotirto Kokap Kulonprogo	Gapoktan Manunggal	2.100.000.000,00
3	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Bang Rum Din Gol II	51.886.250,00
4	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Tanah Kosong	51.113.750,00
5	Tanah	Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	36.191.000,00
6	Tanah	Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
7	Tanah	Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
8	Tanah	Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00
9	Tanah	Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00
10	Tanah	Jl. Kusumanegara 169 E, Yogyakarta	Rumah Dinas	525.000.000,00
11	Tanah	Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	14.000.000,00
12	Tanah	Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	192.000.000,00
13	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Anik Suharmini	20.100.000,00
14	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Sri Wahyu	20.100.000,00
15	Tanah	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rumah Dinas	1.000.000,00
16	Tanah	Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta	Rumdin DPRD Golongan 1	101.700.000,00
17	Tanah	JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	2.251.200.000,00
18	Tanah	Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta	Disewa	3.266.000,00
19	Tanah	Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Sleman	Rumah Dinas	325.000.000,00
20	Tanah	Glugo, panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas	449.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழுவா உழுவா உழுவா கழுவா கழுவா கழுவா

21	Tanah	Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Rumah Dinas	334.500.000,00
22	Tanah	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Rumah Dinas	9.240.000,00
23	Tanah	Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman	Rumah Dinas	52.020.000,00
24	Tanah	Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY	Rumah Dinas	2.450.000,00
25	Tanah	Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta	Rumah Tinggal a.n Setio Agus Sampto, SH	475.378.040,00
26	Tanah	Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta	Rumah Tinggal	1.115.200.000,00
27	Tanah	Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta	-	51.500.000,00
28	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Guddeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU	4.654.320.000,00
29	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pertokoan, Pasar Kelapa, Gapensi	6.151.340.000,00
30	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Kios desa 9 buah	89.600.000,00
31	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi	505.827.000,00
32	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Kios desa 7 buah	471.417.000,00
33	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Bengkel Mobil	451.526.000,00
34	Tanah	Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo	Tanah Bangunan Bengkel	810.020.000,00
35	Tanah	Gadingsari, Sanden, Bantul	Swasta	1.500.000.000,00
36	Tanah	Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta	STIKES	918.000.000,00
37	Tanah	Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman	-	161.600.000,00
38	Tanah	wates, wates Kulon Progo	Koperasi Sumber Rezeki	45.000.000,00
39	Tanah	Gedungkiwo, mantrijeron, Yogyakarta	KPN makaryo	81.000.000,00
40	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa	3.628.742.000,00
41	Tanah	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini	1.517.952.000,00
42	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar Binangun	2.316.100.000,00
43	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar binangun	619.400.000,00
44	Tanah	Caturtunggal, Depok ,Sleman	Yayasan Darmapala	2.107.500.000,00
45	Tanah	Bleberan Playen Gunung Kidul	Obyek Wisata Sri Gethuk	662.100.400,00
46	Tanah	kel. sendang sari, pengasih, kulon progo	Sarang burung walet, EKS sabut kelapa,	1.724.000.000,00
47	Tanah	Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo	Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan	940.000.000,00
48	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	DPD Golkar	1.941.380.000,00
49	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	234.840.000,00
50	Tanah	Beji, Wates	Pertanian	345.565.000,00
51	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	266.090.000,00
52	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	264.860.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகுவானகுவாழிதலபதலபதலபதலபதல

53	Tanah	Beji, Wates, Wates, Kulon Progo	Pertanian	258.300.000,00
54	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	342.475.000,00
55	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	1.364.800.000,00
56	Tanah	Driyan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	156.045.000,00
57	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.786.000,00
58	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	192.713.000,00
59	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	138.334.000,00
60	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	60.844.000,00
61	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	240.960.000,00
62	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	183.443.000,00
63	Tanah	Mutihan, wates, Kulon Progo	Pertanian	92.185.000,00
64	Tanah	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	123.000.000,00
65	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	143.170.000,00
66	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	21.424.000,00
67	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.131.000,00
68	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	82.915.000,00
69	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	101.455.000,00
70	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	243.286.000,00
71	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	311.600.000,00
72	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	164.984.000,00
73	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	48.307.000,00
74	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	94.245.000,00
75	Tanah	Bulak Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	132.355.000,00
76	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	66.744.000,00
77	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.817.000,00
78	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	130.707.000,00
79	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	41.200.000,00
80	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.955.000,00
81	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.682.000,00
82	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	184.782.000,00
83	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.224.000,00
84	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	69.372.000,00
85	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	39.114.000,00
86	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	87.241.000,00
87	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.950.000,00
88	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.120.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ပဝိတံသုဘေ နုဘေ နုဗျေသိတုပတုပတုပတုပတု

89	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	703.840.000,00
90	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	85.116.000,00
91	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	56.498.000,00
92	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	208.369.000,00
93	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.190.000,00
94	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	71.012.000,00
95	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon progo	Pertanian	15.662.000,00
96	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.415.000,00
97	Tanah	Beji, Wates, Kulon progo	Pertanian	111.446.000,00
98	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.662.000,00
99	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	9.600.000,00
100	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.744.000,00
101	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	58.813.000,00
102	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
103	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
104	Tanah	Sentolo, Sentolo, Kulon Progo	Base camp	487.755.000,00
105	Tanah	Jalan Kenari 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	Taman Bunga (Selatan Mandala Krida)	6.774.000.000,00
106	Tanah	Srimulyo, Piyungan, Bantul	Tempat Parkir	1.386.325.000,00
				7.222.096.440,00
BANGUNAN				
1	Bangunan	Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY	102.535.755,00
2	Bangunan	Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul	Bangunan gedung	1.033.385.000,00
3	Bangunan	Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta	Gedung Kantor	840.913.920,00
4	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Gudang, Kepsek, Belajar& Adm	56.965.800,00
5	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Perpustakaan	27.542.400,00
6	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan	33.979.600,00
7	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang UKS, Bayi, Balok	18.988.600,00
8	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, Office, TK Kecil	54.967.000,00
9	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	TK Kecil Ruang Kelas	63.961.600,00
10	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik	85.948.400,00
11	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang	29.982.000,00
12	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Tunggu	35.978.400,00
13	Bangunan	Jl AM Sangaji Cokrodiningratan No. 45, Jetis, Yogyakarta	Gedung sekolah AM Sangaji	175.733.000,00
14	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
15	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	80.822.641,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தலம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

16	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
17	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
18	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
19	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
20	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
21	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	121.500.000,00
22	Bangunan	Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta	Gedung Perumahan	597.790.000,00
23	Bangunan	Komplek Kolombo 58	Gedung Perumahan	52.966.126,00
24	Bangunan	Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman	Gedung Perumahan	90.039.179,00
25	Bangunan	Jl Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	431.752.706,00
26	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas V	202.390.876,00
27	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas III	136.400.000,00
28	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas II	136.400.000,00
29	Bangunan	Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas I	136.400.000,00
30	Bangunan	Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta	eks Rumah Dinas dipinjam pakai BAWASLU	97.375.274,00
31	Bangunan	Jl Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta	Eks Rumah Negara Gol II Tipe C	19.500.000,00
32	Bangunan	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Gedung Rumah Dinas	40.932.000,00
33	Bangunan	Jl. Bima No. 25 C, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas, Dinas Pariwisata BA 593/07217	23.344.578,00
34	Bangunan	Jl Bima No. 25 B, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578,00
35	Bangunan	Jl Bima No 25 A, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	23.344.578,00
36	Bangunan	Jl Bima No. 25, Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Gedung Rumah Dinas	40.019.277,00
37	Bangunan	Gemawang, Karangjati , Sinduadi ,Sleman	Rumah Dinas	158.875.200,00
38	Bangunan	Komplek Griya Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Kalasan, Sleman	Eks Parsenibud	112.338.334,00
39	Bangunan	Komplek Colombo No. 59 Yogyakarta	Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT), Dinas Sosial	36.191.000,00
				5.322.107.822,00
JUMLAH				62.544.204.262,00

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
KPPD BANTUL				
1	Tanah	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Parkir	1.472.393,00
2	Bangunan	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Fotocopi	1.283.517,00
				22.755.910,00
KPPD KULON PROGO				
1	Tanah	Giripeni Wates Kulon Progo	Parkir	161.106.846,00
2	Bangunan	Giripeni Wates Kulon Progo	Kantin, Foto Coppy , BPD dan ATM	194.276.692,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழுவா உகுவா உகுவா கழுவா கழுவா கழுவா

1	Tanah	40.790	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	32.713.580.000,00
2	Tanah	1.512	Kasongan, Bangunjiwo, Bantul	Pemkab Bantul	264.600.000,00
3	Tanah	10.040	Kalitirto, berbah, sleman	Pemkab Sleman	502.000.000,00
4	Tanah	2.510	pandowoharjo , sleman	Pemkab Sleman	125.500.000,00
5	Tanah	5.705	pendowoharjo, sleman	Pemkab Sleman	285.250.000,00
6	Tanah	9.510	sumberagung , mayudan, sleman	Pemkab Sleman	475.500.000,00
7	Tanah	6.770	margodadi , sayegan, sleman	Pemkab Sleman	338.500.000,00
8	Tanah	641	Jl Khudori 49, Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	336.525.000,00
9	Tanah	2.885	Jl. Pakuwon beran kidul, tridadi sleman	Pemkab Sleman	288.500.000,00
10	Tanah	558	Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	511.178.000,00
11	Tanah	9.910	Bimomartani ngemplak ,sleman	Pemkab Sleman	495.500.000,00
12	Tanah	104	Gunungketur, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	83.200.000,00
13	Tanah	2.250	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Kanwil BPN Prov. DIY	1.800.000.000,00
14	Tanah	1.000	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Badan Pusat Statistik Kota YK.	800.000.000,00
15	Tanah	1.380	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	BNN DIY	1.104.000.000,00
16	Tanah	10.001	Sumberrejo semin, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	200.020.000,00
17	Tanah	2.145	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	PMI	1.716.000.000,00
18	Tanah	749	Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	1.761.698.000,00
19	Tanah	2.590	Karangsewu galur kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	103.600.000,00
20	Tanah	10.317	Semanu, semanu , Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	206.340.000,00
21	Tanah	1.720	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	473.000.000,00
22	Tanah	5.520	Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	276.000.000,00
23	Tanah	2.755	Argorejo, Sedayu, Bantul	Pemkab Bantul	68.755.000,00
24	Tanah	1.425	Margosari, Pengasih, KP	Pemkab Bantul	213.750.000,00
25	Tanah	1.225	Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Bantul	1.102.500.000,00
26	Tanah	770	Jl. Veteran Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	539.000.000,00
27	Tanah	9.935	Kulwaru, kulwaru, Wates, kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.490.250.000,00
28	Tanah	1.555	Karangsewu Galur kulon progo Dusun XII	Pemkab Kulon Progo	62.200.000,00
29	Tanah	10.219	Putat, putat gunung kidul	Pemkab Gunung Kidul	204.380.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தாபனம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம் கௌரவம்

13	Bangunan	845	Jl M Faridan M Noto 21 Kotabaru Yogyakarta	BSSN	1.658.571.049,00
14	Bangunan	65	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	109.500.000,00
					10.489.303.013,00
PERALATAN MESIN					
1	Kendaraan	AB 1095 UH	Nissan Terrano	TNI AU	210.000.000,00
2	Kendaraan	AB 82	Toyota Kijang 7K	KPU	145.000.000,00
3	Kendaraan	AB 1870 UA	Toyota Innova G	Lanal Yogyakarta	210.250.000,00
4	Kendaraan	AB 1987 UA	Toyota/ Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00
5	Kendaraan	AB 1988 UA	Toyota/Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,00
6	Kendaraan	AB 1255 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	KPU	247.139.300,00
7	Kendaraan	AB 1253 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	Korem 072 PMK	247.139.300,00
8	Kendaraan	AB 1363 UH	Toyota Rush 1,5 G	KPU	211.035.400,00
9	Kendaraan	AB 1364 UH	Toyota Avanza 1.3 E	KPU	155.035.400,00
10	Kendaraan	AB-1726-YX	INNOVA 2.0 GMT LUXURY	BPN	276.073.000,00
11	Kendaraan	AB 2621 UA	Honda	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,00
12	Kendaraan	AB 2360 UB	Honda ND125	SEKRETARIAT KPU	8.400.000,00
					2.187.265.500,00
JUMLAH					182.090.607.113,00
SATPOL PP					
PERALATAN MESIN					
1	Kendaraan	AB 1660 UA	Suzuki Station Wagon (APV)	BNNP	66.000.000,00
JUMLAH					66.000.000,00

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Rp82.178.412.601,00

Rp74.340.011.191,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.178.412.601,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121

Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hak Cipta	131.849.000,00
2	Software	31.811.047.516,00
3	Kajian	43.238.888.045,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉகழவாஉகழவாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வா

4	Website	1.270.181.840,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.726.446.200,00
	Jumlah	82.178.412.601,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.936.174.300,00	4.846.123.950,00
2	Dinas Kesehatan	1.576.428.255,00	1.488.267.155,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	17.448.429.735,00	11.892.485.035,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.075.000,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.363.803.000,00	204.550.000,00
8	Dinas Sosial	36.966.000,00	36.966.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.230.000,00	150.230.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	662.762.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00
12	Dinas Perhubungan	2.153.442.308,00	2.153.442.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.320.202.500,00	6.177.807.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	542.494.000,00	533.990.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.385.119.540,00	2.385.119.540,00
16	Dinas Kebudayaan	11.492.705.925,00	11.378.013.425,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.685.524.462,00	2.685.524.462,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	643.113.500,00	668.613.500,00
19	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.793.500,00	556.504.340,00
22	Sekretariat Daerah	2.575.767.910,00	2.404.318.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-
24	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	460.855.200,00	411.201.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.339.114.325,00	9.339.114.325,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாசு கழுவாசு கழுவாசு கழுவாசு கழுவாசு கழுவாசு

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.942.232.816,00	5.898.522.816,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	775.416.500,00	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	624.475.750,00	624.475.750,00
	Jumlah	82.178.412.601,00	74.340.011.191,00

Tabel 5.123

Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	5.105.194.450,00	710.818.000,00	-	120.161.850,00
2	Dinas Kesehatan	-	1.142.455.105,00	214.694.050,00	33.618.000,00	185.661.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	-	290.837.660,00	17.157.592.075,00	-	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	162.090.000,00	-	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	51.697.500,00	-	-	97.377.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	204.925.000,00	-	169.575.000,00	989.303.000,00
8	Dinas Sosial	-	36.966.000,00	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	150.230.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	31.850.000,00	522.412.750,00	108.500.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	651.208.000,00	3.259.629.250,00	36.298.000,00	49.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	-	567.129.808,00	1.586.312.500,00	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	6.320.202.500,00	-	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	444.494.000,00	-	-	98.000.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	341.811.000,00	1.754.179.000,00	289.129.540,00	-
16	Dinas Kebudayaan	-	2.156.486.875,00	6.768.021.800,00	191.477.500,00	2.376.719.750,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	1.280.350.022,00	117.239.440,00	-	1.287.935.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	376.349.500,00	81.299.000,00	132.432.000,00	53.033.000,00
19	Dinas Pariwisata	-	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	109.537.000,00	918.788.780,00	138.900.000,00	39.100.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	333.893.500,00	20.000.000,00	-	57.900.000,00
22	Sekretariat Daerah	131.849.000,00	1.486.561.910,00	917.757.000,00	-	39.600.000,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-	-	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	412.405.245,00	519.036.200,00	109.851.800,00	79.140.000,00
25	Inspektorat	-	460.855.200,00	-	-	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.991.010.625,00	6.348.103.700,00	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	5.352.077.816,00	381.105.000,00	-	209.050.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	746.166.500,00	-	29.250.000,00	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	399.657.300,00	149.203.450,00	31.150.000,00	44.465.000,00
	Jumlah	131.849.000,00	31.811.047.516,00	43.238.888.045,00	1.270.181.840,00	5.726.446.200,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணு வாக நுவாக நுவாகுணு குலபகுலபகுலபகுலபகுல

26	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
27	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
28	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
29	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
30	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000,00	-	5.000.000,00
31	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000,00	-	5.000.000,00
32	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
33	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
34	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
35	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
36	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
37	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
38	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
39	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000,00	-	5.000.000,00
40	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000,00	-	5.000.000,00
41	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
42	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
43	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
44	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
45	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
46	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
47	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000,00	-	5.000.000,00
48	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
49	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
50	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
51	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
52	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
53	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
54	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARCO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
55	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
56	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
57	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
58	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000,00	-	5.000.000,00
59	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000,00	-	5.000.000,00
60	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
61	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
62	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000,00	-	5.000.000,00
63	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
64	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
65	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
66	001311008436	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
67	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
68	001311008492	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
69	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	-	5.000.000,00
70	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
71	001311008501	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
72	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
73	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00
74	001311008667	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
75	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமகிழ்வுவாடகழவாடகழகாடிதுலபதலபரதுறககக

1	001221034261	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	-	1.206.969,00	1.206.969,00
2	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	-	1.206.078,00	1.206.078,00
3	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	-	1.085.787,00	1.085.787,00
4	001221033342	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	-	1.071.342,00	1.071.342,00
5	001221034804	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	-	1.031.199,00	1.031.199,00
6	001221034260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	-	999.428,00	999.428,00
7	001221035316	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	-	992.440,00	992.440,00
8	001221035451	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	-	967.012,00	967.012,00
9	001221034740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	-	942.974,00	942.974,00
10	001221032926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	-	922.318,00	922.318,00
11	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	-	895.706,00	895.706,00
12	001221035877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	-	852.532,00	852.532,00
13	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	-	849.187,00	849.187,00
14	001221033345	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	-	830.552,00	830.552,00
15	001221036069	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	-	796.909,00	796.909,00
16	001221035237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	-	780.926,00	780.926,00
17	001221032837	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	-	756.293,00	756.293,00
18	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	-	754.206,00	754.206,00
19	001221033982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	-	733.605,00	733.605,00
20	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	-	732.002,00	732.002,00
21	001221031890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S	-	725.447,00	725.447,00
22	001221034212	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	-	720.486,00	720.486,00
23	001221033324	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	-	716.595,00	716.595,00
24	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	-	715.525,00	715.525,00
25	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	-	715.525,00	715.525,00
26	001221034140	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	-	715.500,00	715.500,00
27	001221034141	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	-	715.500,00	715.500,00
28	001221032886	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	-	705.550,00	705.550,00
29	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	-	697.267,00	697.267,00
30	001221034284	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	-	697.267,00	697.267,00
31	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	-	697.250,00	697.250,00
32	001221033987	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	-	696.856,00	696.856,00
33	001221033971	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	-	695.712,00	695.712,00
34	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	-	684.381,00	684.381,00
35	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	-	684.017,00	684.017,00
36	001221034400	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	-	683.861,00	683.861,00
37	001221034359	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	-	680.113,00	680.113,00
38	001221034365	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	-	679.035,00	679.035,00
39	001221035740	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	-	674.105,00	674.105,00
40	001221031745	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	-	667.786,00	667.786,00
41	001221032357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	-	647.906,00	647.906,00
42	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	-	645.830,00	645.830,00
43	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	-	645.813,00	645.813,00
44	001221034640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	-	645.785,00	645.785,00
45	001221033812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	-	640.872,00	640.872,00
46	001221035514	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	-	637.748,00	637.748,00
47	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	-	629.336,00	629.336,00
48	001221034751	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	-	625.371,00	625.371,00
49	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	-	625.355,00	625.355,00
50	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	-	625.355,00	625.355,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாநகரம் டாஃரஃம் டிஸ்திமேவா யோக்யாகர்டா

Table with 6 columns: ID, Code, Name, Unit, Budget, and Actual. Rows 51-100 listing various government entities and their financial data.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாநகரம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம்

Tabel 5.126

Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2020

BANK PASAR KULON PROGO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	4900/XI/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	43.700.000,00	-	43.700.000,00
2	5227/V/D/13/118	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	18.690.000,00	-	18.690.000,00
3	6375/IX/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	51.500.000,00	-	51.500.000,00
4	5754/III/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	150.700.000,00	-	150.700.000,00
5	6195/VIII/D/14/133	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	51.200.000,00	-	51.200.000,00
6	4822/X/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	44.670.000,00	-	44.670.000,00
7	4912/XII/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	50.040.000,00	-	50.040.000,00
8	9832/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	92.000.000,00	-	92.000.000,00
		Jumlah	502.500.000,00	-	502.500.000,00
1	650601030579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	-	25.282.744,00	25.282.744,00
2	650601031380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	-	19.117.824,00	19.117.824,00
3	650601035425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	-	22.656.812,00	22.656.812,00
4	650601032864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	-	120.380.046,00	120.380.046,00
5	650601035097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	-	23.038.526,00	23.038.526,00
6	650601030367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	-	26.350.455,00	26.350.455,00
7	650601030602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	-	31.078.231,00	31.078.231,00
8	650601029861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	-	22.147.138,00	22.147.138,00
		Jumlah	-	290.051.776,00	290.051.776,00
		JUMLAH JAMREK	502.500.000,00	290.051.776,00	792.551.776,00
BNI TRIKORA					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	1101274754	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA	38.870.085,00	-	38.870.085,00
2	0799697895	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	49.132.760,00	-	49.132.760,00
3	1107392466	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO	110.064.780,00	-	110.064.780,00
4	0898052558	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	26.435.895,00	-	26.435.895,00
5	0899114811	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	26.435.895,00	-	26.435.895,00
6	0899556699	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO	71.843.436,00	-	71.843.436,00
7	0817378837	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA	69.289.957,00	-	69.289.957,00
8	0725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	91.749.733,00	-	91.749.733,00
9	1055756851	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO	20.381.843,00	-	20.381.843,00
10	0823310417	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN	49.021.616,00	-	49.021.616,00
11	1101438534	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA	40.279.882,00	-	40.279.882,00
12	0739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	75.427.454,00	-	75.427.454,00
13	0949363770	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	60.639.778,00	-	60.639.778,00
14	0970258820	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	75.753.006,00	-	75.753.006,00
15	1146473327	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	38.500.000,00	-	38.500.000,00
16	0775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	74.213.437,00	-	74.213.437,00
17	1144060446	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA	35.584.421,00	-	35.584.421,00
18	0896340548	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KUSUMA ARGASUKTI	66.763.597,00	-	66.763.597,00
19	0860876147	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	76.137.940,00	-	76.137.940,00
20	0768376572	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV RIMBA SARANA	14.971.931,00	-	14.971.931,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாநகரம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம்

Tabel 5.127

Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2020

BRI CABANG CIK DITIRO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	0029.01.017398-40-0	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA	60.103.600,00	-	60.103.600,00
2	0029.01.017352-40-4	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG	69.613.220,00	-	69.613.220,00
3	0029.01.015976-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	219.175.538,00	-	219.175.538,00
4	0029.01.015929-40-9	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	43.533.540,00	-	43.533.540,00
5	0029.01.015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto	45.963.053,00	-	45.963.053,00
6	0029.01.015930-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	44.572.086,00	-	44.572.086,00
7	0029.01.017317-40-4	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	42.309.952,00	-	42.309.952,00
8	0029.01.017316-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	52.053.768,00	-	52.053.768,00
9	0029.01.015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa	10.749.194,00	-	10.749.194,00
10	0029.01.015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya	15.327.054,18	-	15.327.054,18
11	0029.01.015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group	72.384.470,00	-	72.384.470,00
12	0029.01.015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur	73.744.928,00	-	73.744.928,00
13	0029.01.015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia	75.105.105,00	-	75.105.105,00
14	0029.01.015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	40.925.065,00	-	40.925.065,00
15	0029.01.015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya	40.652.386,00	-	40.652.386,00
16	0029.01.015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya	7.085.352,00	-	7.085.352,00
17	0029.01.015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko	71.202.693,00	-	71.202.693,00
18	0029.01.015992-40-2	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukanto	44.082.360,00	-	44.082.360,00
19	0029.01.015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin	98.435.378,00	-	98.435.378,00
20	0029.01.015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	148.734.739,00	-	148.734.739,00
21	0029.01.015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk	147.943.254,00	-	147.943.254,00
22	0029.01.015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan	22.503.372,00	-	22.503.372,00
23	0029.01.015991-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	50.155.156,00	-	50.155.156,00
24	0029.01.015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno	5.231.103,00	-	5.231.103,00
25	0029.01.015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	38.024.371,00	-	38.024.371,00
26	0029.01.016035-40-7	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	55.159.374,00	-	55.159.374,00
27	0029.01.015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional	8.437.420,00	-	8.437.420,00
28	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri	21.475.990,00	-	21.475.990,00
29	0029.01.015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldor Indonesia	7.120.443,00	-	7.120.443,00
30	0029.01.015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara	85.024.830,00	-	85.024.830,00
31	0029.01.015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak Indonesia	112.427.569,00	-	112.427.569,00
32	0029.01.015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa	103.242.574,00	-	103.242.574,00
33	0029.01.015618-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi	116.936.105,00	-	116.936.105,00
34	0029.01.015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera	26.571.244,00	-	26.571.244,00
35	0029.01.015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	13.631.994,00	-	13.631.994,00
36	0029.01.015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana	51.014.670,00	-	51.014.670,00
37	0029.01.015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto	44.269.558,00	-	44.269.558,00
38	0029.01.015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto	62.475.906,00	-	62.475.906,00
39	0029.01.015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	23.691.716,00	-	23.691.716,00
40	0029.01.016129-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	50.364.886,00	-	50.364.886,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦢꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi dan UKM

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	03-11-2020 s.d 22-11-2021	549.818.182,00	01/01/2021 s.d 22/11/2021	491.070.485,84
	Jumlah	549.818.182,00		491.070.485,84

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp962.826.565,59 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.133

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
BPKA INDUK						
1.	Tanah dan Bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2020 s/d 31/08/2021	108.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	71.901.369,86
2.	Bangunan	BPD DIY	01/07/2017 s.d 30/06/2022 01/07/2017 s.d 30/06/2018 01/07/2018 s.d 30/06/2019 01/07/2019 s.d 30/06/2020 01/07/2020 s.d 30/06/2021 01/07/2021 s.d 30/06/2022	602.500.000,00 120.500.000,00 120.500.000,00 120.500.000,00 120.500.000,00 120.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-06-2021	- - - - 59.754.794,52 20.500.000,00
3.	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2020 s/d 31/03/2021 01/04/2021 s/d 31/03/2022	108.900.000,00 108.900.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	26.852.054,79 08.900.000,00
4	Tanah	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2019 s.d 30/06/2020 01/07/2020 s.d 31/06/2021	2.500.000,00 2.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-06-2021	- 1.239.726,03
5	Tanah dan Bangunan	BUKP Gondokusuman	01/09/2019 s.d 31/08/2022 01/09/2019 s.d 31/08/2020 01/09/2020 s.d 31/08/2021 01/09/2021 s.d 31/08/2022	60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	- - 13.315.068,49 20.000.000,00
6	Tanah	Yayasan Perguruan Dharma Pala Sleman Akta Notaris 26/2008 tgl 28 November 2008	20/11/2017 s.d 19/11/2021 20/11/2017 s.d 19/11/2018 20/11/2018 s.d 19/11/2019 20/11/2019 s.d 19/11/2020 20/11/2020 s.d 19/11/2021	14.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00	01-01-2021 s/d 19-11-2021	- - - - 3.097.260,27



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாநகரம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம் கரகம்

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
		Suka Astuti	01/09/2019 s.d 31/08/2021 01/09/2019 s.d 31/08/2020 01/09/2020 s.d 31/08/2021	7.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	- - 2.396.712,33
14	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi Sarjuri	01/09/2020 s.d 31/08/2021	6.400.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	4.260.821,92
15	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017 s.d 31/01/2022 01/02/2017 s.d 31/01/2018 01/02/2018 s.d 31/01/2019 01/02/2019 s.d 31/01/2020 01/02/2020 s.d 31/01/2021 01/02/2021 s.d 31/01/2022	109.891.800,00 21.978.360,00 21.978.360,00 21.978.360,00 21.978.360,00 21.978.360,00	01-01-2021 s/d 31-01-2021	1.866.655,23 21.978.360,00
16	Tanah dan Bangunan (Rumah Daerah)	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2019 s.d 31/07/2022 01/08/2019 s.d 31/07/2020 01/08/2020 s.d 31/07/2021 01/08/2021 s.d 31/07/2022	35.000.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00	1-1-2021 s/d 31-07-2021	- - 10.164.383,56
17	Tanah	Rohadi	01/10/2019 s.d 30/09/2021 01/10/2019 s.d 30/09/2020 01/10/2020 s.d 30/09/2021	3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	- - 1.121.917,81
18	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	01/04/2016 s.d 31/03/2021 01/04/2016 s.d 31/03/2017 01/04/2017 s.d 31/03/2018 01/04/2018 s.d 31/03/2019 01/04/2019 s.d 31/03/2020 01/04/2020 s.d 31/03/2021	72.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	- - - - - 3.575.342,47
19	Tanah dan Bangunan	CV. Plainthing Group	08/04/2019 s.d 07/04/2021 08/04/2019 s.d 07/04/2020 08/04/2020 s.d 07/04/2021	42.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00	01-01--2021 s/d 07-04-2021	- - 5.580.821,92
20	Tanah dan Bangunan	Lembaga Konsumen Yogyakarta	01/06/2018 s.d 31/05/2021 01/06/2018 s.d 31/05/2019 01/06/2019 s.d 31/05/2020 01/06/2020 s.d 31/05/2021	9.075.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00 3.025.000,00	01-01-2021 s/d 31-05-2021	- - - 1.251.438,36
21	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Desaku (LP2 Desaku)	01/02/2019 s.d 31/01/2021 01/02/2019 s.d 31/01/2020 01/02/2020 s.d 31/01/2021	16.500.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00	01-01-2021 s/d 31-01-2021	- - 700.684,93
22	Tanah dan Bangunan	Abung Hidayah Uep Sumiarsih	10/01/2020 s.d 30/9/2021 10/01/2020 s.d 30/9/2021	7.500.000,00 3.200.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021 01-01-2021 s/d 30-09-2021	5.609.589,04 2.393.424,66



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுதல் கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண கல்யாண

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
		Tatang Raharja	10/01/2020 s/d 30/9/2021	4.700.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.515.342,47
		Zuljasrifon	10/01/2020 s/d 30/9/2021	4.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.365.753,42
23	Tanah	Eks TKD Wates	05/07/2020 s/d 04/07/2021	275.202.132,00	01-01-2021 s/d 04-07-2021	39.486.012,11
24	Tanah	SMK Citra Semesta Indonesia	08/01/2020 s/d 31/7/2021	16.875.000,00	01-01-2021 s/d 31-07-2021	9.801.369,86
25	Rumah Dinas	Asmita	01/08/2020 s/d 01/08/2021	2.792.400,00	01-01-2021 s/d 01-8-2021	1.621.887,12
		Umi Hartini	01/10/2020 s/d 31/3/2021	816.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	408.000,00
		Ny. Djaenab Murniati	01/12/2020 s/d 31/3/2021	2.513.600,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	1.885.200,00
		Hasan Khoiri	01/12/2020 s/d 28/2/2021	775.800,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	517.200,00
		Sigit Arianta Wibowo	01/08/2020 s/d 01/08/2021	1.429.200,00	01-01-2021 s/d 01-08-2021	830.110,68
		Sugiyanta	01/08/2020 s/d 28/2/2021	1.269.100,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	362.600,00
		Dra. Sulistyaningsih	01/02/2020 s/d 01/02/2021	3.396.000,00	01-01-2021 s/d 01-02-2021	288.427,40
JUMLAH						810.488.295,04
KPPD KULON PROGO						
1	Bangunan	PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/07/2021	1.742.465,75
		PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	3.000.000,00	01/08/2020 s.d 31/07/2021	1.742.465,75
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44
		CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.323.287,67
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	15.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	9.147.945,21
		Painem (Kantin)	01/08/2020 s.d 31/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	53.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	10.750.000,00
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	01/01/2017 s.d 31/12/2021	15.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	3.000.000,00
JUMLAH						33.817.397,26



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
KPPD SLEMAN						
1	Bangunan	PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas)	01/01/2019 s.d 31/12/2023	95.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/12/2023	57.000.000,00
		PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM)	01/04/2019 s.d 31/03/2024	81.775.000,00	01/01/2021 s.d 31/03/2024	53.153.750,00
JUMLAH						110.153.750,00
KPPD BANTUL						
1	Bangunan	Bank BNI Cabang Yogyakarta	16/10/2020 s.d 15/10/2023	9.000.000,00	01/01/2021 s.d. 15/10/2023	8.367.123,29
JUMLAH						8.367.123,29
TOTAL						962.826.565,59

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp2.413.635.867,00

Rp3.117.387.223,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.413.635.867,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2020 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp21.534.281,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.249.451.538,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.134

Rincian Utang Belanja per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	708.640.200,00	1.105.937.347,00
2	Dinas Kesehatan	311.362.346,00	199.198.814,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	418.539.915,00	475.433.021,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.443.295,00	12.158.807,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.852.671,00	10.359.252,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.529.645,00	12.407.893,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.084.028,00	32.605.057,00
8	Dinas Sosial	76.409.211,00	80.175.754,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.403.040,00	52.863.388,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	14.156.894,00	22.044.634,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.706.538,00	35.586.000,00
12	Dinas Perhubungan	33.439.209,00	37.364.769,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.562.744,00	19.187.270,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.968.935,00	11.143.274,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.474.276,00	7.142.645,00
16	Dinas Kebudayaan	104.893.218,00	133.321.213,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.399.631,00	122.889.577,00



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريته دايره ايسيموا يوجياكارتا

BUKP mencatat laba sebesar Rp11.747.195.265,96, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.766.618.144,12 (83,140% x Rp11.747.195.265,96). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.766.618.144,12.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO Rp89.967.042.816,85 Rp180.332.233.977,07

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp89.967.042.816,85 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	120.498.600,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	8.941.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	21.541.249.683,40
4	Pendapatan Bunga - LO	4.401.193.283,62
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	10.475.000,00
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	452.947.912,00
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	15.898.676.800,00
8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	88.018.529,30
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	34.978.000,00
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	68.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LO	552.597.840,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	5.592.948.484,85
12	Pendapatan BLUD - LO	35.712.390.011,00
13	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	5.484.127.672,68
	Jumlah	89.967.042.816,85

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO Rp3.726.454.595.432,00 Rp3.608.013.435.006,00

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2020 sebesar Rp3.726.454.595.432,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Rp2.371.044.354.021,00 Rp2.385.702.912.253,0

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp2.371.044.354.021,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum - LO, dan Dana Alokasi Khusus - LO dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦝꦺꦫꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦿꦠ

Tabel 5.139

Rincian Pendapatan Hibah - LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	3.006.443.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	28.200.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.924.000.000,00
4	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35.346.337.914,23
5	Hibah Barang pada BPBD	16.645.230.370,00
6	Hibah Barang pada Dinas Sosial	20.700.000,00
7	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
8	Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika	456.058.490,00
9	Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	476.812.123,00
10	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	8.849.478.100,00
11	Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	27.259.648.406,00
12	Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah	50.000.000,00
13	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.600.000,00
14	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	231.695.000,00
15	Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja	1,00
Jumlah		96.353.203.404,23

Hibah Barang terdapat pada OPD berikut:

- Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp35.346.337.914,23 berasal dari Block Grant, dan Komite Sekolah.
- Hibah Barang pada BPBD sebesar Rp16.645.230.370,00 berasal dari BNPB dan Pihak Lain terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di DIY.
- Hibah Barang pada Dinas Sosial sebesar Rp20.700.000,00 berasal dari Kementerian Sosial.
- Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp50.000.000,00 berupa mushola berasal dari Takmir masjid.
- Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp456.058.490,00 berasal dari Pihak Ketiga.
- Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp476.812.123,00 berasal dari Perpustakaan Nasional.
- Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.849.478.100,00 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Hibah Barang pada BPKA sebesar Rp27.259.648.406,00 berasal dari Kenterian PU, Kab.Bantul, Kab Kulon Progo, Kemenkes, dan Kementerian Pertanian.
- Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari PT. BPD DIY
- Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.600.000,00 berasal dari peserta Diklat PKA dan PKP.
- Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp231.695.000,00 berasal dari Kementerian Kesehatan.
- Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1,00 berasal dari sumbangan PT. Borobudur yang tidak ada nilainya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வாஉகழவாஉகழவாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வா

5.4.2 Beban **Rp4.663.624.192.027,54** **Rp4.871.151.715.959,20**

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.663.624.192.027,54 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi **Rp3.574.026.798.490,91** **Rp3.854.207.914.909,49**

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.574.026.798.490,91 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai **Rp1.558.830.493.941,39** **Rp1.551.059.704.219,00**

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140

Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	904.295.719.330,39	795.081.963.553,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	521.178.068.065,00	440.567.196.757,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.414.000.000,00	12.905.294.694,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.103.069.151,00	46.177.496.341,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	735.073.630,00	968.441.119,00
6	Uang Lembur	-	359.856.000,00
7	Beban Honorarium PNS	19.650.131.575,00	82.511.790.075,00
8	Beban Honorarium Non PNS	49.767.059.072,00	155.085.927.362,00
9	Beban Pegawai BLUD	9.672.988.118,00	14.823.529.468,00
10	Beban Pegawai BOS	1.014.385.000,00	2.578.208.850,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

Tabel 5.141

Rincian Beban Pegawai per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	788.656.453.595,00	813.657.184.305,00
2	Dinas Kesehatan	53.715.751.478,00	57.757.958.385,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	37.996.529.077,00	41.496.345.368,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.709.973.472,00	14.196.342.575,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.528.709.183,00	5.960.942.350,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.300.671.493,00	12.281.646.101,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.011.737.101,00	7.320.087.724,00
8	Dinas Sosial	25.090.556.269,00	25.224.766.444,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.124.721.123,00	16.853.842.073,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.825.714.691,00	4.713.165.478,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.920.381.113,00	26.830.029.717,00
12	Dinas Perhubungan	7.563.269.251,00	10.384.464.831,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.497.046.086,00	5.099.742.016,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.805.751.297,00	5.447.516.316,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.513.691.348,00	4.073.131.260,00
16	Dinas Kebudayaan	18.694.256.056,00	27.198.683.357,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.302.029.961,00	8.392.682.926,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.617.069.139,00	9.781.735.981,00
19	Dinas Pariwisata	4.450.134.801,00	4.754.888.293,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.747.515.088,00	29.014.562.397,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.273.756.669,00	9.294.403.954,00
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.783.613.656,00	3.248.890.330,00
23	Sekretariat Daerah	27.944.523.081,00	38.356.701.409,00
24	Badan Penghubung Daerah	2.663.435.979,00	2.672.773.422,00
25	Paniradya Kaistimewan	5.313.350.691,00	2.360.113.735,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.852.849.274,00	36.455.579.794,00
27	Sekretariat DPRD	5.291.885.813,00	9.264.487.168,00
28	Inspektorat	11.123.224.901,00	11.814.849.414,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.729.842.333,00	9.613.372.483,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	111.522.337.649,39	107.979.050.852,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	277.606.294.436,00	184.231.004.529,00
32	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.653.417.837,00	5.328.759.232,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp775.568.864.314,21 Rp1.246.156.710.165,83

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp775.568.864.314,21 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணுமடக நுமடக நுமடக ஸ்டீதுமபதமபுமபுமபுமபு

Tabel 5.142

Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	18.081.030.908,00	267.585.682.692,31
2	Beban Persediaan Bahan/Material	174.066.500,00	107.404.127.480,03
3	Beban Jasa Kantor	238.647.869.756,00	233.135.955.648,00
4	Beban Premi Asuransi	1.186.173.293,95	2.592.347.803,39
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.933.185.256,00	13.293.870.131,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	108.515.450,00	35.685.089.829,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir	5.341.064.241,74	17.315.001.542,10
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.478.649.050,00	9.795.109.411,00
9	Beban Sewa Alat Berat	686.500.800,00	283.178.500,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.198.089.911,00	34.910.883.209,00
11	Beban Makanan dan Minuman	44.725.856.560,00	101.669.856.297,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	52.500.000,00	919.158.330,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	-	4.047.156.150,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	4.613.839.350,00
15	Beban Perjalanan Dinas	31.713.432.937,00	95.272.402.957,00
16	Beban Pemeliharaan	75.420.050.225,03	85.440.166.287,00
17	Beban Jasa Konsultansi	26.774.820.165,00	49.240.061.136,00
18	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	8.226.300.065,00
19	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	2.211.489.695,00
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.984.630.000,00	25.204.232.000,00
21	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.885.017.115,00	6.060.286.119,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.198.196.041,00	125.834.340.534,00
23	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.266.200.000,00	15.416.175.000,00
24	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.536.600.000,00	-
25	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.092.740.000,00	-
26	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	112.397.000,00	-
27	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	260.961.279.104,49	-
	Jumlah	775.568.864.314,21	1.246.156.710.165,83



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial Rp1.492.000.000,00 Rp702.000.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.492.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak bermasalah sosial dan pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp371.321.524.908,85 Rp341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp371.321.524.908,85 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147

Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.507.700.707,48	147.758.261.904,45
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.322.205.800,66	75.065.156.045,80
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.689.846.695,47	114.682.427.493,64
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	800.784.977,17	1.242.994.950,78
5	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.000.986.728,07	2.298.847.960,80
	Jumlah	371.321.524.908,85	341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாணுயாஉருயாஉருயாஊரிதாபாதுயாருயாருயா

5.4.2.1.9 Beban Lain-lain Rp566.223.583,08 Rp67.724.775,00

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp566.223.583,08 pada PPKD berupa Bebanj Penyisihan Dana Bergulir..

5.4.2.2 Beban Transfer Rp1.089.597.393.536,63 Rp1.016.943.801.049,71

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.089.597.393.536,63 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.149
Rincian Beban Transfer**

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	697.652.615.144,00	731.506.477.128,71
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	390.599.778.392,63	281.452.614.421,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.345.000.000,00	1.560.062.700,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	2.424.646.800,00
	Jumlah	1.089.597.393.536,63	1.016.943.801.049,71

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO Rp1.068.875.252.051,07 Rp1.105.299.674.860,14

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.068.875.252.051,07 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.732.499.444.078,61 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.663.624.192.027,54.

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO Rp3.339.152.986,53 Rp5.446.791.027,53

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp3.339.152.986,53 merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp6.376.401.624,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp3.037.248.637,47. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp6.376.401.624,00 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:

1. Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.367.955.715,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp9.748.035.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp3.380.079.285,00.
2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp8.445.909,00 terdiri dari Surplus non operasional Rp4.145.075,00 (penjualan tanaman kedaluwarsa) sebesar Rp4.145.075,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp69.536.500,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp65.391.425,00 serta kenaikan nilai persediaan cadangan beras sebesar Rp4.300.834,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

5.5.1 Ekuitas Awasal

Rp10.343.362.322.871,10

Rp9.095.978.154

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp10.343.362.322.871,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.247.384.168.552,96 atau 13,71% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.095.978.154.318,13. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp10.343.362.322.871,10 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.557.422.076.509,61
2	Dinas Kesehatan	179.762.825.687,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3.058.195.690.829,72
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	524.083.361.686,34
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.556.243.731,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.699.320.323,73
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.009.703.135,58
8	Dinas Sosial	94.565.366.637,84
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.839.783.963,66
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.950.667.358,84
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.853.960.307,36
12	Dinas Perhubungan	161.692.715.906,93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.749.482.969,38
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.178.711.916,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.531.290.946,07
16	Dinas Kebudayaan	415.657.130.631,09
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	157.641.801.722,99
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	172.375.226.982,68
19	Dinas Pariwisata	52.052.629.791,66
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	229.930.924.085,77
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.894.325.491,44
22	Sekretariat Daerah	227.893.463.423,09
23	Badan Penghubung Daerah	25.674.229.162,28
24	Sekretariat DPRD	136.873.720.942,12
25	Inspektorat	16.917.483.561,61
26	Paniradya Kaistimewan	2.285.113.979,73
27	Badan Perencanaan Daerah	15.757.924.905,40



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦲꦏꦂꦠ

No	Uraian	Ekuitas Awal
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.196.011.323.389,32
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.721.481.369.198,80
30	Badan Kepegawaian Daerah	13.129.987.658,22
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.694.466.034,11
	Jumlah	10.343.362.322.871,10

5.5.2 Surplus/Defisit

Rp834.436.546.190,56

Rp1.110.746.465.887,67

Surplus/Defisit LO Tahun 2020 sebesar Rp834.436.546.190,56 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan LO	Beban	Surplus/Defisit
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.577.576.117,00	1.163.420.589.776,45	(1.160.879.949.726,05)
2	Dinas Kesehatan	34.199.327.394,00	130.987.936.323,78	(96.788.608.929,78)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	7.944.031.617,30	223.274.800.630,58	(215.328.080.700,78)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	14.762.674.885,90	(14.783.788.305,90)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7.997.124.638,35	(7.997.124.638,35)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.317.000,00	14.049.809.195,67	(14.034.691.245,67)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.978.674.916,00	282.157.212.584,20	(254.348.487.668,20)
8	Dinas Sosial	532.200.000,00	62.429.508.117,94	(61.897.308.117,94)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.793.755.000,00	24.139.107.634,55	(22.747.323.738,99)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	7.929.982.931,87	(7.929.982.931,87)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.289.238.539,05	47.326.848.650,47	(34.037.610.111,42)
12	Dinas Perhubungan	1.762.157.200,00	33.600.560.843,01	(31.839.547.958,03)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	27.615.080.468,22	(27.614.157.968,22)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	106.978.987,16	17.254.651.917,11	(17.188.554.669,95)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	512.415.000,00	5.817.634.050,26	(5.305.219.050,26)
16	Dinas Kebudayaan	413.104.500,00	105.305.906.594,27	(104.892.802.094,27)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	165.414.300,00	28.459.748.643,32	(28.296.447.343,32)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	836.388.400,00	27.991.895.035,49	(27.155.506.635,49)
19	Dinas Pariwisata	42.031.952,90	14.328.055.316,97	(14.286.023.364,07)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦧꦲꦶꦠꦤꦶꦥꦺꦝꦸꦫꦺꦤ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦂꦠ

Tabel 5.152

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar pada OPD

No	Uraian	Dampak Kumulatif
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.316.785.535,24
2	Dinas Kesehatan	672.546.151,96
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	(19.021.874.272,18)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	46.416.882.795,47
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.107.085,99)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(78.929.069,01)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	270.025.507.818,00
8	Dinas Sosial	(82.398.133,63)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.223.393.326,24
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(3.820.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.198.179.429,01
12	Dinas Perhubungan	2.647.028.755,13
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.565.270.321,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.097.280.081,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	6.174.300,00
16	Dinas Kebudayaan	(45.444.670.346,46)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.226.199.311,16
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.748.328.610,49
19	Dinas Pariwisata	(33.552.666,67)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.064.270.533,55
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.098.083.195,85
22	Sekretariat Daerah	(1.284.687.260,81)
23	Badan Penghubung Daerah	842.200.000,00
24	Sekretariat DPRD	(900.000,00)
25	Inspektorat	(25.431.851,88)
26	Paniradya Kaistimewan	(487.996.329,55)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(562.500,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(123.318.043.499,88)
29	PPKD/BUD	(95.270.542.796,34)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாண டானா அலாகசி கஹுஸு
பெரிமாண டானா ஓனாமி கஹுஸு
பெரிமாண டானா பனயசூவான
பெரிமாண பனடபாநா பாஹி ஹாஸி பாஹி
பெரிமாண பாநூநா கஹுஸாநா டானா பமா லாநய்யா
பெரிமாண ஹிபாஹ
பெரிமாண டானா டாரூராத
பெரிமாண லாநய்யா
பெரிமாண டானா பனடபாநா லூர பமாசா

8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.029.119.335.346,00	978.540.310.453,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.286.576.228.221,00	1.162.772.688.443,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	58.831.799.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	780.019.190,00	706.035.310,00
13	Penerimaan Hibah	8.349.499.513,00	8.548.463.000,00
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50

5.6.1.2 Arus Kas Keluar Rp4.492.546.774.424,03 Rp4.509.447.244.845,17

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.492.546.774.424,03 dipergunakan untuk:

Tabel 5.155
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.562.236.884.707,39	1.553.763.754.881,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	707.629.279.470,01	1.072.294.764.575,00
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	78.044.846.317,00	76.067.609.352,00
5	Pembayaran Hibah	744.149.764.252,00	735.398.604.386,46
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.009.947.911,00	51.143.429.903,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	391.944.778.392,63	285.437.323.921,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	305.639.352.770,00	-
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	693.891.920.604,00	735.341.757.826,71
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.492.546.774.424,03	4.509.447.244.845,17

5.6.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp1.117.782.246.308,6 Rp1.186.556.966.944,33

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.117.782.246.308,68 berasal dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதாழ்வானகழவானகழவாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வா

4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp8.941.000,00 merupakan penjualan drum bekas sebesar Rp5.592.000,00, dan Penjualan Hasil Penebangan Pohon sebesar Rp3.349.000,00.
5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp3.145.029.200,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	DPM LDPM	3.000.000,00
	DPM LUEP	52.000.000,00
	Jumlah	55.000.000,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan (Koperasi)	600.000,00
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	1.088.429.200,00
	Dana BUKP	2.000.000.000,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Erupsi)	1.000.000,00
	Jumlah	3.090.029.200,00
	Total	3.145.029.200,00

5.6.2.2 Arus Keluar KAs Rp1.058.223.924.931,64 Rp1.243.800.185.484,85

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.058.223.924.931,64 dipergunakan untuk:

Tabel 5.159
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	696.800.024.901,00	469.142.424.222,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	137.484.204.942,00	159.857.330.876,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	52.613.388.365,00	138.986.381.949,17
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.021.109.346,64	242.118.840.886,68
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	15.382.208.041,00	23.907.706.051,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	332.989.336,00	1.190.501.500,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.590.000.000,00	198.597.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.058.223.924.931,64	1.243.800.185.484,85



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம் கழகம்

5.6.4.1 Arus Masuk KAs Rp1.651.525.349.291,00 Rp6.013.143.620.114,68

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	74.140.737.793,37	42.781.245.870,37
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	1.460.627.772.698,63	5.707.365.457.874,31
4	Sisa Uang Persediaan	-	6.516.806.832,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp116.756.838.799,00, Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp116.756.838.799,00 terdiri dari:

Tabel 5.162

Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	52.059.250.128,00
2	PPH Pasal 21	6.040.736.691,00
3	Taperum	757.914.000,00
4	PPn	48.511.365.674,00
5	PPH Pasal 22	3.361.831.321,00
6	PPH Pasal 23	3.511.854.702,00
7	PPH Pasal 4 (2)	2.513.886.283,00
	Jumlah	116.756.838.799,00

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163

Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	106.246.927.970,00	97.229.763.307,00	9.017.164.663,00	-
2	Dinas Kesehatan	26.529.736.670,00	25.783.408.822,00	746.327.848,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	432.273.781.776,00	430.292.544.268,00	1.981.237.508,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.163.669.967,00	35.722.495.888,00	441.174.079,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.654.910.541,00	4.224.455.262,00	430.455.279,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.224.231.531,00	5.185.263.892,00	38.967.639,00	-



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦏꦿꦠ

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.527.053.928,00	4.121.736.079,00	405.317.849,00	-
8	Dinas Sosial	19.146.438.559,00	18.331.939.884,00	814.498.675,00	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.375.869.565,00	4.967.860.278,00	408.009.287,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.986.734.841,00	1.870.222.620,00	116.512.221,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.106.067.894,00	10.852.883.596,00	253.184.298,00	-
12	Dinas Perhubungan	3.708.792.993,00	3.479.842.790,00	228.950.203,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.755.857.726,00	2.584.761.109,00	171.096.617,00	-
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.848.498.643,00	7.536.686.377,00	311.812.266,00	-
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.169.946.482,00	1.159.144.801,00	10.801.681,00	-
16	Dinas Kebudayaan	243.438.508.466,00	241.197.763.271,00	2.240.745.195,00	-
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.161.692.044,00	4.876.104.913,00	285.587.131,00	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.296.861.506,00	4.931.078.390,00	365.783.116,00	-
19	Dinas Pariwisata	7.521.325.696,00	6.862.318.470,00	659.007.226,00	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.008.502.705,00	8.706.147.409,00	302.355.296,00	-
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.342.436.587,00	5.291.609.897,00	50.826.690,00	-
22	Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	22.734.730.240,00	19.248.030.300,00	3.486.699.940,00	-
24	Paniradya Kaistimewan	5.330.603.050,00	5.139.267.325,00	191.335.725,00	-
25	Badan Penghubung Daerah	1.477.739.785,00	1.448.710.184,00	29.029.601,00	-
26	DPRD	-	-	-	-
27	Sekretariat DPRD	44.712.079.203,00	37.676.087.249,00	7.035.991.954,00	-
28	Inspektorat	6.289.179.861,00	6.150.711.268,00	138.468.593,00	-
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.881.831.743,00	4.592.524.256,00	289.307.487,00	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	89.518.848.900,00	88.846.458.250,00	672.390.650,00	-
31	PPKD	405.057.698.575,00	363.136.272.300,63	41.921.426.274,37	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	7.944.588.587,00	6.945.968.198,00	998.620.389,00	-
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	2.333.364.458,00	2.235.712.045,00	97.652.413,00	-
	JUMLAH	1.534.768.510.492,00	1.460.627.772.698,63	74.140.737.793,37	-

5.6.4.2 Arus Kas Keluar Kas

Rp1.651.525.349.291,00

Rp6.013.143.620.114,68

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

پيمريتا دايراه ايسيموا يوجياكارتا

Tabel 5.167

Rincian Kas Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di BUD	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00	7.145.501.321,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00	54.694.388,00
4	Kas di BLUD	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06
5	Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	-
6	Kas Lainnya di Rekening Sumbangan	88.015,00	-
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
1	Kas Lainnya	-	12.987.501.459,00
	Jumlah Kas (Neraca)	484.453.213.139,46	433.555.460.454,42

Penjelasan:

Kas di Kasda sebesar Rp441.671.236.637,40 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp439.850.345.019,04, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.692.632.443,00 dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp52.675.210,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah pada :

- a. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.127.000,00.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.682.919,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.334.000,00.
- d. Dinas Koperasi sebesar Rp43.531.291,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, pada :

- a. Dinas Perpustakaan Arsip Daerah sebesar Rp2.113.000,00
- b. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.405.460,00

Kas di BLUD sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkesos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168

Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Ghrasia, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp9.360.340.315,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp2.412.929,00	9.362.753.244,15
2	RS Paru Respira, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp10.661.454.406,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp15.944.713,00	10.677.399.119,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos, Dinas Kesehatan	2.108.285.943,29



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிதா ஸ்தாபனம் கர்வா கர்வா ஸ்தாபனம் கர்வா ஸ்தாபனம்

	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.104.778.230,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp3.507.713,00	
4.	Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp3.239.035.266,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp7.636.226,00	3.246.671.492,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp4.619.400.751,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp6.239.546,00	4.625.640.297,62
6.	BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.653.005.348,00, dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp4.207.562,00	2.657.212.910,00
	Jumlah	32.677.963.006,06

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa dana BOS tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp614.183.396,00 dan sisa dana BOS tahun 2020 sebesar Rp9.430.548.415,00.

Kas Lainnya di Rekening Sumbangan sebesar Rp88.015,00 merupakan jasa giro di Rekening Sumbangan Covid 19 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦢꦺꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan efektifitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 meliputi pembentukan perangkat daerah, jabatan pada perangkat daerah, dan *Parampara Praja*.

Perangkat daerah yang ditetapkan terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, meliputi:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
 - 1) Biro Tata Pemerintahan
 - 2) Biro Hukum
 - 3) Biro Organisasi
 - 4) Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
 - c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
 - 1) Biro Bina Mental Spiritual
 - 2) Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
2. *Paniradya Kaistimewan*
3. Sekretariat DPRD
4. Inspektorat
5. Dinas Daerah
 - a. Dinas Pariwisata
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - l. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦺꦩꦺꦫꦶꦠꦫꦺꦁꦢꦫꦺꦴꦩꦶꦠꦺꦩꦶꦮꦪꦏꦂꦠ

- p. Dinas Sosial
- q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
- s. Satuan Polisi Pamong Praja
- 6. Badan Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7. Badan Penghubung Daerah

6.2 Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan pengaturan keistimewaan DIY berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

பெரிமாறுவா உருவா உருவா இனாபுரினாபுரினா

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi *Covid-19* sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic *Covid-19*. Laporan Keuangan Tahun 2020 selain disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 39 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 40 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X